

RENSTRA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi tahun 2021 – 2026, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026 sangat penting disusun sebagai acuan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang telah ditetapkan.

Sasaran pembangunan perkebunan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026 akan dicapai melalui beberapa Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Renstra ini akan menjadi bahan dan pertimbangan dalam pemantapan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026 nantinya.

Penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan, semoga Renstra tahun 2021-2026 ini bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Jambi, Januari 2022
KEPALA DINAS,

Ir. H. AGUSRIZAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19640819 198503 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi pokok dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya SKPD	15
2.3. Sumber Daya Sarana Prasarana Kantor	17
2.4. Telaahan Rancangan akhir Perubahan Renstra OPD 2016-2021	18
2.5. Capaian Kinerja Program dan kegiatan Renstra 2016-2021	18
2.6. Capaian penting Renstra periode 2016-2021	26
2.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	50
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian	55
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	61
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	63
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi	71
5.2. Arah Kebijakan	72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	
6.1. Program dan Kegiatan (Urusan)	77
6.2. Program dan Kegiatan (Non Urusan)	79

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Rencana kinerja penyelenggaraan bidang	92
BAB VIII PENUTUP	96
LAMPIRAN.	

DAFTAR TABEL

Tabel.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	15
Tabel.2. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.....	17
Tabel.3. Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Periode 2016-2021	20
Tabel.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	29
Tabel.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	30
Tabel.6. Luas Perkebunan 7 Komoditi Unggulan Provinsi Jambi 2015-2019	36
Tabel.7. Luas Tanaman Tua/Rusak 7 komoditi unggulan Perkebunan	36
Tabel.8. Produksi 7 komoditi unggulan Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2015-2019	37
Tabel.9. Produktivitas 7 komoditi unggulan Perkebunan Provinsi Jambi	38
Tabel.10. Status Data Perizinan Perkebunan Sawit di Provinsi Jambi Dalam Stranas KPK	40
Tabel.11. Jumlah Pabrik Kelapa Sawit di Provinsi Jambi	42
Tabel.12. Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	46
Tabel.13. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi OPD	47
Tabel.14. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi,Misi dan Program Gubernur dan wakil Gubernur ...	54
Tabel.15. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (IKU Dinas Perkebunan)	68
Tabel.16. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	75
Tabel.17. Indikator Kinerja Program Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 2022-2026	80
Tabel.18. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	83
Tabel.19. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan (RKPD)	92

DAFTAR GRAFIK

Grafik.1. Jumlah SDM Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	15
Grafik.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Renstra (Th.2020)	19
Grafik.3. Rasio Pencapaian Kinerja sesuai Tupoksi OPD 2016-2021	28
Grafik.4. Rasio Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 2016-2020	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Perkebunan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional, meliputi ; Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kesempatan kerja, Sumber Pendapatan dan Perekonomian regional dan nasional. Perkebunan menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang memberikan kontribusi cukup besar kepada pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan kedepan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumber daya, terjadinya perubahan iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh.

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah terkait dengan bidang pembangunan perkebunan. Upaya pencapaian keberhasilan Visi dan Misi OPD perlu didukung dengan perencanaan yang baik, Pendekatan yang dilakukan adalah melalui Perencanaan Strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Tahun 2021 ini setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih pada tanggal 07 Juli 2021 oleh Bapak Presiden RI, maka dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 harus disusun, dan saat ini masih dalam proses pematangan terhadap Rancangan awal RPJMD untuk ditetapkan bersama DPRD menjadi RPJMD. RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sedang menyusun Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Ranwal RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026. Selanjutnya Ranwal Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi ini akan dibahas bersama untuk ditetapkan menjadi Renstra Dinas Perkebunan. Renstra yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi setiap tahunnya selama periode 5 (lima) tahunan kedepan.

Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul (Inpres. RI. Nomor 7 Tahun 1999).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat juga dilakukan evaluasi yang terkait dengan 3 (tiga) hal pokok, yaitu ; kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi merupakan suatu proses yang terletak pada bagian pertengahan, dan atau pada akhir dari proses kebijakan, yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Penilaian disini merupakan kegiatan untuk membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan untuk melakukan revisi terhadap substansi Renstra yang sudah ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja Perangkat Daerah kedepannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI. Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
18. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17, 18, 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
26. *Peraturan Gubernur Jambi Nomor* Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026;
27. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
28. *Peraturan Gubernur Jambi Nomor* Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Dumisake Provinsi Jambi;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026, yaitu :

- a) Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pada subsektor perkebunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru program dan target kegiatan;
- b) Merupakan dokumen perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
- c) Mempermudah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perkebunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026, yaitu:

- a) Menentukan arah dan menjadi acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan perkebunan di Provinsi Jambi untuk 5 tahun kedepannya.
- b) Mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2026 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas mengenai sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diulas tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dijelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan tentang indikator kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 43 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standarisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sertifikasi dan Mutu benih, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan, serta pengembangan pembibitan tanaman perkebunan;
- 3) Pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan supervisi di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- 5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perkebunan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD yang terkait;
- 7) Penyampaian laporan sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui sekretaris daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 bagian Sekretariat dan 4 bidang teknis serta 3 UPTD, sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17, 18, dan 19 Tahun 2018 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

2.1.1. Sekretariat

Tugas pokoknya adalah; membantu dinas dalam rangka pengoordinasian, penyiapan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, dan administrasi umum serta kepegawaian lingkup dinas dan sekretariat.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan perencanaan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- b. Pelaksanaan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- c. Pengawasan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi dan keuangan dan aset.
- e. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan anggaran pembangunan.
- f. Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang lain dan UPTD.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat dibantu oleh ;

1. Sub.Bag Umum dan Kepegawaian
2. Sub.bagian Program dan Evaluasi
3. Sub.bagian Keuangan dan Aset

2.1.2. Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan

Tugas bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan produksi tanaman perkebunan.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan kebijakan, strategi Pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan.
- b. Pelaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan di bidang produksi benih, tanaman semusim, rempah penyegar, penyegar dan tanaman tahunan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan.
- d. Pengelolaan kebun sumber daya genetik (SDG) Tanaman Perkebunan.
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- f. Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD dan,
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Perbenihan
2. Seksi Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
3. Seksi Tanaman Tahunan.

2.1.3. Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan

Tugas bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.

Sedangkan fungsinya sebagai:

- a. Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan kegiatan pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya Perkebunan.
- b. Pelaksanakan kebijakan, pembinaan, pengawasan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.
- c. Pelaksanakan kebijakan, pembinaan, pengawasan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.
- e. Penyusunan kebijakan, strategis pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi pelaku usaha perkebunan.
- f. Penyusunan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesian sustainable palm oil (ISPO).
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- h. Penyusunan pertimbangan teknis bahan rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan untuk izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) dan izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P).
- i. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD.
- k. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan penyuluhan perkebunan sebagai pertanggungjawaban dan,
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengembangan perkebunan, terdiri dari :

- 1. Seksi Penataan Sumberdaya Perkebunan.
- 2. Seksi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi
- 3. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.

2.1.4 Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan

Tugas bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, prasarana dan sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisasi pengganggu tanaman, pengelolaan lahan dan air.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, pengelolaan lahan dan air.
- b. Pelaksanaan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan Pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, pengelolaan lahan dan air.

- c. Pelaksanakan evaluasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) Perkebunan, pengelolaan lahan dan air.
- d. Pelaksanaan pengawasan regulasi bidang perkebunan oleh (penyidik pegawai negeri sipil PPNS).
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana sarana dan perlindungan perkebunan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang lain serta UPTD.
- h. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
- i. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana sarana dan perlindungan perkebunan sebagai pertanggungjawaban.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan lahan dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari :

- 1. Seksi Pupuk, Pestisida dan Prasarana Sarana Perkebunan
- 2. Seksi Penanganan Gangguan usaha dan OPT Perkebunan
- 3. Seksi Pengelolaan lahan dan air.

2.1.5 Bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Tugas bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu serta pemasaran hasil Perkebunan. Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- b. Pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil Perkebunan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan unit pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- f. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan harmonisasi penerapan standar mutu hasil perkebunan.

- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- h. Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri dari :

- 1. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
- 2. Seksi Standardisasi dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan
- 3. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No.17 Tahun 2018, No.18 Tahun 2018 dan No.19 Tahun 2018, Dinas Perkebunan memiliki tiga (3) UPTD yaitu :

1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perkebunan dalam bidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian mutu benih dan mengawasi peredarannya, memberikan bimbingan pengawasan dan pengembangan mutu benih.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. pelaksanaan pengawasan peredaran dan mutu sumber benih.
- b. pelaksanaan pendataan potensi dan penyaluran benih.
- c. pelaksanaan pemeriksaan bahan penilaian izin usaha produksi benih.
- d. pelaksanaan evaluasi usaha produksi benih;.
- e. pelaksanaan pemeriksaan dokumen benih dan mengklarifikasi dengan sumber benih;
- f. pelaksanaan pembinaan penerapan standar mutu benih;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h. pengoordinir tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTP)

Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perkebunan dibidang pengujian dan pengembangan teknis perlindungan perkebunan.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. perencanaan program kerja dan anggaran UPTD BPTP;.

- b. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian internal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan perkebunan;
- d. pengkajian bahan petunjuk teknis operasional perlindungan tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait lingkup dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan (BPPBTP) Sei Tiga

Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan (BPPBTP) dinas Perkebunan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018, yang berkedudukan di desa Sei Tiga Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

UPTD-BP2BTP mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dalam peningkatan dan ketersediaan benih unggul tanaman perkebunan pada dinas.

Sedangkan fungsinya adalah :

- a. perumusan program kerja UPTD BPPBTP;
- b. pelaksanaan pengendalian teknis operasional penyediaan benih, penyaluran dan pemasaran benih;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi teknis terkait bidang tugasnya;
- d. penyediaan benih tanaman perkebunan;
- e. pengkoordinasian penyaluran benih tanaman perkebunan dengan bidang terkait;
- f. pelaksanaan pemasaran benih tanaman perkebunan atas persetujuan kepala dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. Sampai tahun 2021 jumlah tenaga Fungsional Teknis dinas Perkebunan Provinsi Jambi tersedia 20 (dua puluh) orang PNS yang tersebar pada setiap bidang, yang meliputi ; 7 orang Fungsional Penyuluh Pertanian, 2

orang Analis Pasar, 3 orang Pengawas Benih Tanaman, dan 6 orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan 2 orang Fungsional Perencana.

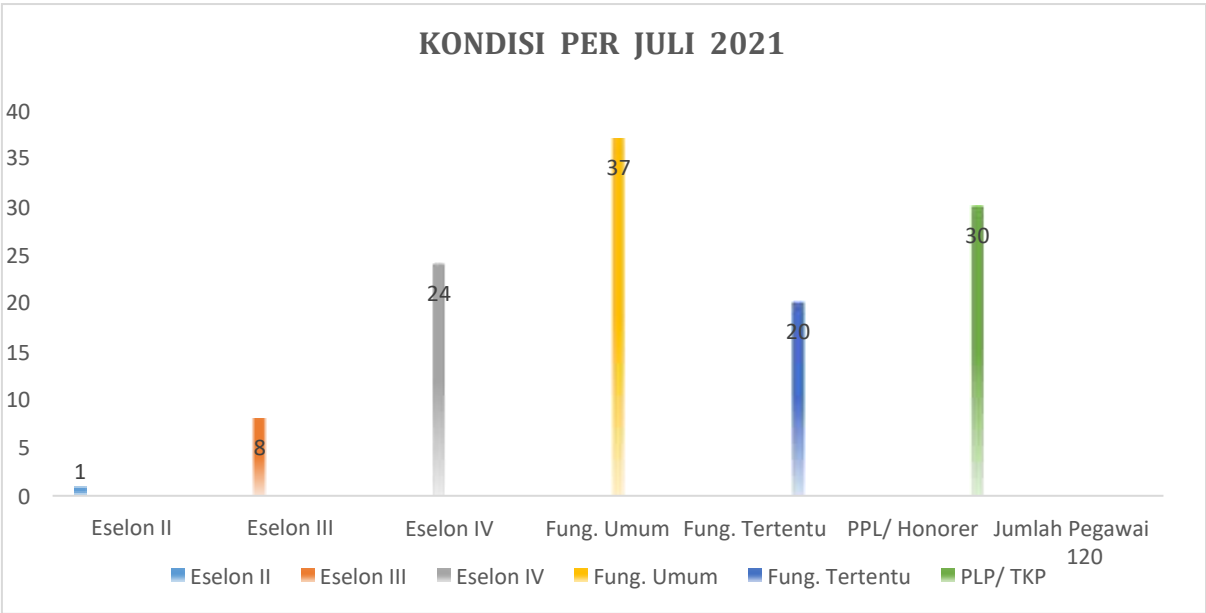
2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam pelaksanaan tugas kegiatan pembangunan, masing-masing Bidang, Sekretariat dan UPTD mengacu kepada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Secara umum, susunan Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

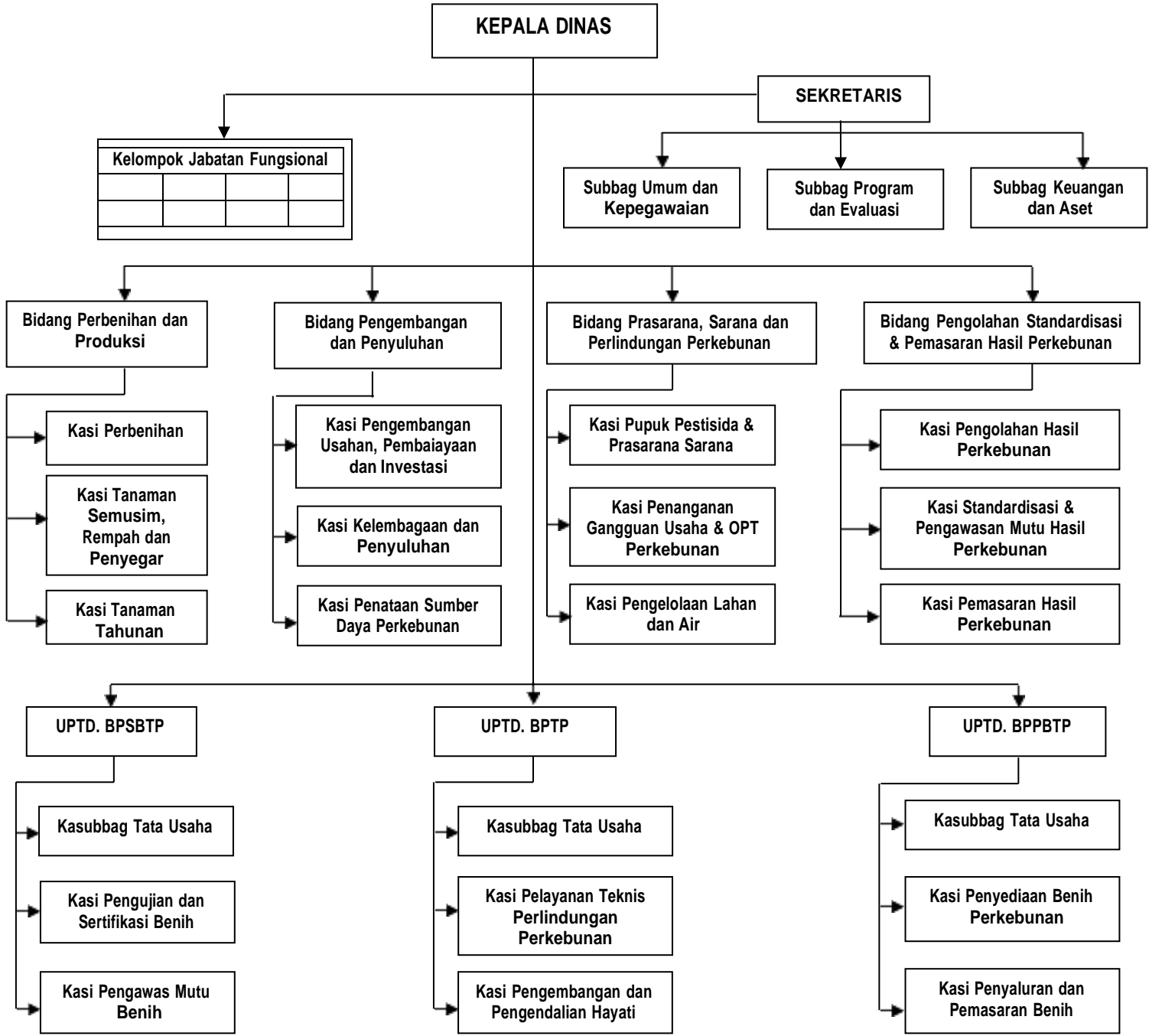
Tabel. 1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

No	Tingkat Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	7	Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD
3	Eselon IV	17	Kasubbag dan Kasi
4	Fungsional	20	PP, AP, PBT, PMHP
5	Fungsional Umu	59	Sarjana dan non Sarjana
6	TKS dan PLTKP	43	Sarjana dan non Sarjana

Jumlah Pegawai yang tercatat mencapai 112 orang, dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dilengkapi dengan sarana kerja yang cukup lengkap akan tetapi saat ini kondisi sarana kerja tersebut sebagian besar dalam keadaan rusak ringan hingga berat. Untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin besar dimasa yang akan datang diperlukan penambahan sarana kerja yang lebih memadai. Selanjutnya susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI



2.3. Sumber daya Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021

N o	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Tanah	1.343.318 M ²	Sebagian Kecil Belum bersertifikat
2	Bangunan	37 Unit	14 unit rusak berat, 4 unit rusak sedang, 2 unit rusak ringan, 17 unit Baik.
3	Alat Angkut	47 Unit	24 Unit baik, 23 Unit rusak berat
4	Alat Pertanian	175 Unit	71 unit rusak ringan, 50 unit rusak berat, dan 40 unit baik
5	Alat Pengolah Data	83 Unit	5 Unit baik, 33 unit rusak berat, 10 unit rusak ringan,
6	Alat Laboratorium	4 Unit	4 Unit baik
7	Alat kantor Rumah Tangga dan	164 Unit	120 Unit baik, 40 unit rusak ringan, 2 unit rusak berat

Sumber : Data olahan Dinas Perkebunan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk prasarana Tanah terdapat sebagian belum bisa dibuat Sertifikatnya, seperti Tanah di UPTD Pijauan Sertifikat asli masih bersatu dengan gedung Bapelkes Provinsi Jambi belum dipecah sertifikatnya, juga tanah rumah dinas (3 unit) di Kota Baru dekat Lapangan Tembak belum bisa dibuat Sertifikatnya dikarenakan ada 3 (tiga) kepemilikan lahan tersebut sehingga proses sertifikat baru belum bisa dilanjutkan oleh BPN Kota Jambi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum masih dapat digunakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan (rehabilitasi) dan penambahan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah rusak berat dan mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.4 Telaahan Rancangan akhir Perubahan Renstra OPD periode 2016-2021

Perubahan atau Revisi Renstra dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dilakukan pada bulan Oktober 2018 sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, dan dengan tetap mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD.

Substansi Renstra dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang mengalami perubahan adalah terkait dengan, sebagai berikut ;

1. Penyesuaian Nomenklatur kegiatan, dan sub kegiatan yang terlalu panjang redaksinya, disederhanakan menjadi satu nama kegiatan/sub kegiatan.
2. Penyesuaian Capaian Indikator kinerja Sasaran (Outcome), penyempurnaan Target capaian setiap tahunnya.

Hasil telaah Rancangan akhir (Ranhir) Perubahan Renstra dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, diperoleh data dan informasi bahwa Ranhir Perubahan Renstra tersebut belum dilakukan secara Maksimal, terutama terhadap nilai angka capaian Target Sasaran, Program dan Kegiatan sesuai dengan Target yang ditetapkan didalam Renstra Kementan RI tahun 2019-2024.

2.5 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Renstra periode 2016-2021

Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan *pelayanan administrasi perkantoran*, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2020 mencapai rasio 1,17 atau 117 %, dari sisi kuantitas mencapai rasio 0,94.

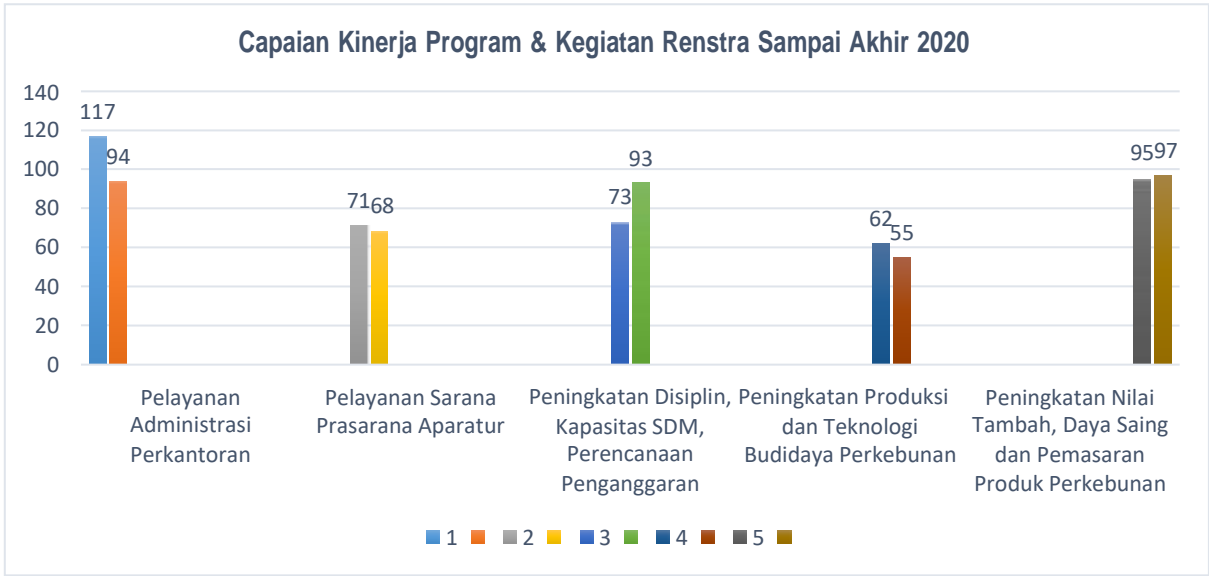
Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya *penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur*, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2020 mencapai rasio 0,68 atau 68 %, dari sisi kuantitas mencapai rasio 0,71.

Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya *peningkatan disiplin, kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan pelaporan*, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2020 mencapai rasio 0,73 atau 73 %, dari sisi kuantitas mencapai rasio 0,93.

Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya *peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan*, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2020 mencapai rasio 0,62 atau 62 %, dari sisi kuantitas mencapai rasio 0,55.

Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya *peningkatan Nilai tambah, Daya saing dan Pemasaran produk perkebunan*, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2020 mencapai rasio 0,95 atau 95 %, dari sisi kuantitas mencapai rasio 0,97.

Terkait dengan pelaksanaan Renstra dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2016-2021, berbagai program dan kegiatan telah digelontorkan baik melalui pembiayaan APBD-Provinsi Jambi maupun dukungan dana APBN setiap tahun sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dinas Perkebunan Provinsi Jambi.



Capaian kinerja dinas Perkebunan Provinsi Jambi selama 5 tahun, secara umum dapat dikategorikan **Cukup Baik**, hal ini diindikasikan dengan **rasio Serapan Anggaran sebesar 0,83** atau dapat dikatakan penggunaan Anggaran hanya 83 % dari Target anggaran Renstra yang ditetapkan, namun **capaian rata-rata rasio Kuantitas sebesar 0,82** artinya hanya 82 % saja kegiatan yang ditetapkan didalam Renstra dapat dilaksanakan, dan atau sebesar 18 % kegiatan yang ditetapkan didalam Renstra tidak dapat direalisasikan.

Adapun rincian dari Capaian Program dan Kegiatan didalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel. 3 berikut ini ;

[illegible]

Tabel.3. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan

Periode Pelaksanaan : 2016 - 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke										Unit Penanggung Jawab
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.	Tetapannya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran																																	

-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13		-14		-15		-16		-17		-18		-19		-20		-21		-22
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.	Tersedianyasarana prasaranaaparatur yang memadai	Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur																																			
		Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana Kantor	0	10 Unit	5.595.128.707	3 Unit	1.277.255.000	0		3 Unit	1.341.117.750	2 Unit	1.408.173.638	2 Unit	1.478.582.319	3 Unit	1.277.255.000	0	-	3 Unit	627.426.000	3 Unit	2.094.329.100	-	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,47	1,00	1,44	1,00	0,00		
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Beroperasinya mobil jabatan	46 Unit	230 Unit	1.977.533.031	46 unit	372.408.000	39 unit	372.408.000	46 unit	391.028.400	46 unit	410.579.820	46 unit	431.108.811	46 unit	372.408.000	39 unit	311.850.000	46 unit	365.097.304	46 unit	373.600.000	46 unit	313.669.719	1,00	1,00	0,85	0,84	1,00	0,93	1,00	0,91	1,00	0,73	
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan gedung kantor	Jumlah Perengkapan gedung	18 Unit	90 Unit	771.617.550	1 pkt	185.820.000	0	0	1 pkt	185.820.000	1 pkt	195.111.000	1 pkt	204.866.550	1 pkt	54.000.000	1 pkt	60.300.000	0	-	1 pkt	72.900.000	1 pkt	78.650.000	1,00	0,29	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,37	1,00	0,38	
		Perambatan daya dan instalasi listrik	Tersedianya daya listrik	2 Unit	2 Unit	120.000.000	0	0	0	0	1	60.000.000	1	60.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	1	40.000.000	0	-	0,00	0,00		0,00		0,00	1,00	0,67		0,00	
		Kegiatan pemeliharaan gedung kantor (lepas ringan-sedang)	Tersedianya gedung kantor	5 Unit	16 Unit	2.940.000.000	3 unit	90.000.000	3 Unit	500.000.000	3 unit	500.000.000	5 Unit	1.500.000.000	2 Unit	350.000.000	0	-	0	-	0	-	5 Unit	1.575.900.000	2 Unit	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,05	1,00	0,09	
		Pengadaan meubelair	Tersedianya Meubelair	10 Unit	50 Unit	1.250.000.000	0	0	20 Unit	500.000.000	20 Unit	500.000.000	10 Unit	250.000.000	0	0	0	-	0	-	20 Unit	75.350.000	10 Unit	155.944.000	43 Unit	323.677.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,15	1,00	0,62		0,00	
		Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan dinas	2 Unit	8 Unit	6.157.188.569	2 Unit	1.375.714.000	0	0	2 Unit	1.516.724.685	2 Unit	1.592.560.919	2 Unit	1.672.188.965	0	-	0	-	2 Unit	59.700.000	2 Unit	675.000.000	0	-	0,00	0,00		0,00	1,00	0,04	1,00	0,42	1,00	0,00	
		Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perengkapan kantor	12 Bln	60 Bln	286.384.008	27 unit	54.000.000	27 unit	56.700.000	27 unit	59.535.000	27 unit	62.511.750	27 unit	65.637.338	27 unit	-	0	-	27 unit	136.700.000	27 unit	151.200.000	27 unit	183.211.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,42	0,00	2,79	
		Kegiatan Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer	10 Unit	30 Unit	411.957.500	10 unit	99.000.000	0	0	10 unit	99.000.000	10 unit	103.950.000	10 unit	109.147.500	10 unit	97.999.000	0	-	10 unit	66.695.000	10 unit	180.030.000	10 unit	135.000.000	1,00	0,99	0,00	0,00	1,00	0,67	1,00	1,73	1,00	1,24	

-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13		-14		-15		-16		-17		-18		-19		-20		-21		-22	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.	Peningkatan disiplin Aparatur	Program Peningkatan disiplin Aparatur																																				
		Pengadaan Pakian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakian dinas	165 Stel	825 Stel	364.420.663	165 Stel	66.000.000	154 Stel	69.300.000	165 Stel	72.765.000	165 Stel	76.483.250	165 Stel	80.223.413	165 Stel	65.957.100	154 Stel	69.300.000	165 Stel	93.258.000	165 Stel	98.800.000	165 Stel	107.250.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,29	1,00	1,34		
4.	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber dayaAparatur																																				
		Pendidikan dan Pelatihan formal	Meningkatnya SDM Aparatur	5 Orang	100 Orang	414.422.344	20 Org	75.000.000	20 Org	78.750.000	20 Org	82.687.500	20 Org	86.821.675	20 Org	91.162.969	20 Org	74.100.000	20 Org	78.750.000	20 Org	49.611.000	20 Org	51.450.000	-	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,60	1,00	0,59	0,00	0,00			
5.	Peningkatan mutu Pengawasan dan Pelaporan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD																																				
		Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	Tersusunnya Laporan	10 Buku	200 Buku	862.025.000	0	0	50 Buku	200.000.000	50 Buku	210.000.000	50 Buku	220.500.000	50 Buku	231.535.000	0	-	50 Buku	100.000.000	50 Buku	129.299.760	50 Buku	105.000.000	50 Buku	80.000.000	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,62	1,00	0,48	1,00	0,35		
6.	Peningkatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran	Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD																																				
		Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RKJ, DPA, RENJA, RKT, RENSTRA dan TAPKIN)	Tersusunnya dokumen Perencanaan	180 Buku	720 Buku	1.724.650.000	0	0	180 Buku	400.000.000	180 Buku	420.000.000	180 Buku	441.000.000	180 Buku	463.050.000	180 Buku	444.198.220	180 Buku	127.186.720	180 Buku	339.176.000	180 Buku	264.687.900	180 Buku	123.871.700	0,00	0,00	1,00	0,32	1,00	0,81	1,00	0,60	1,00	0,27		
		Penyusunan Statistik Perkebunan dan pelaporan	Tersusunnya dokumen Statistik Perkebunan	60 Buku	200 Buku	1.308.540.750	0	0	50 Buku	350.000.000	50 Buku	367.500.000	50 Buku	385.875.000	50 Buku	405.168.750	0	-	50 Buku	247.186.720	50 Buku	249.934.000	50 Buku	239.230.900	50 Buku	65.000.000	0,00	0,00	1,00	0,71	1,00	0,68	1,00	0,62	1,00	0,16		

-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13		-14		-15		-16		-17		-18		-19		-20		-21		-22	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi Unggulan Perkebunan	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya perkebunan																																				
		Peremajaan Kelapa Dalam	Terlaksananya Peremajaan Kebun Kelapa	50 Ha	650 Ha	2.323.146.386	50 Ha	437.493.729	50 Ha	437.493.729	200 Ha	459.368.415	200 Ha	482.336.836	200 Ha	506.453.678	50 Ha	30.393.000	50 Ha	198.000.000	60 ha	209.064.200	150 Ha	690.800.700	200 Ha	189.700.000	1,00	0,07	1,00	0,45	0,3	0,46	0,75	1,43	1,00	0,37		
		Pengembangan Tanaman Lada	Terbangunnya kebun demplot Lada	5 Ha	75,5 Ha	1.483.152.580	12 Ha	222.897.400	3,5 Ha	150.000.000	20 Ha	352.182.452	20 Ha	369.791.575	20 Ha	388.281.152	0		5 Ha	22.245.500	5 Ha	254.678.000	0		0		0,00	0,00	2,00	0,15	0,25	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pengembangan kopi dan coklat diareal Kelapa Dalam	Terbangunnya kebun Kopi dan Coklat rakyat	50 Ha	484 Ha	1.858.543.750	92 Ha	350.000.000	92 Ha	350.000.000	100 Ha	367.500.000	100 Ha	385.875.000	100 Ha	405.168.750	92 Ha	222.372.100	80 Ha	839.050.700	60 ha/32 ha	777.444.000	50 Ha	695.000.000	50 Ha	299.362.000	1,00	0,64	0,87	2,40	0,6	2,12	0,5	1,80	0,5	0,74		
		Pengembangan Kopi rakyat	Terbangunnya kebun kopi	50 Ha	400 Ha	1.445.667.039	0	0	100 Ha	335.411.859	100 Ha	352.182.452	100 Ha	369.791.575	100 Ha	388.281.152	0		180 Ha	1.639.429.250	40 ha	1.761.827.000	0		0		0,00	0,00	1,8	4,89	0,4	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pengembangan Kopi diantara Kelapa Dalam	Terbangunnya kebun kopi rakyat	100 Ha	500 Ha	1.781.078.898	100 Ha	335.411.859	100 Ha	335.411.859	100 Ha	352.182.452	100 Ha	369.791.575	100 Ha	388.281.152	0		0		0		0		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pembangunan kebun induk Pinang	Terbangunnya kebun induk Pinang	100 Ha	500 Ha	1.202.094.949	0	-	100 Ha	278.900.252	100 Ha	292.845.265	100 Ha	307.487.528	100 Ha	322.861.904	0		40 Ha	253.222.700	0		0		0		0,00	0,00	0,4	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar dan ISPO	Terbinanya Perusahaan Perkebunan dan Rintisan Sertifikasi ISPO	40 Perusahaan	196 PT	1.086.395.393	20 PT	460.000.000	40 PT	145.331.143	40 PT dan 1 Gapoktan	152.597.700	38 PT dan 1 Gapoktan	160.227.585	38 PT dan 1 Gapoktan	168.238.964	20 PT	451.700.000	38 PT dan 1 Gapoktan	373.000.000	38 PT dan 1 Gapoktan	334.350.000	38 PT dan 1 Gapoktan	420.000.000	14 PT dan 1 Gapoktan	100.000.000	0,95	0,98	0,95	2,57	1,00	2,19	1,00	2,62	1,00	0,59		
		Updating data base Penetapan Komoditi Unggulan Perkebunan	Tersedianya Data dan Peta komoditi Unggulan Perkebunan	0	10 Peta	298.830.074	2 Peta	216.800.000	2 Peta	82.030.074	0	-	0	-	0	2 Buku	201.743.100	2 Peta	276.631.000	0	-	0		0		1,00	0,93	1,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Road Map Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan Provinsi Jambi 2017 - 2021	Tersusunnya Masterplan Komoditi Unggulan Perkebunan	0	4 Buku	788.125.000	0	-	0	-	2 Buku	250.000.000	2 Buku	262.500.000	2 Buku	275.625.000	0	-	0		2 Buku	250.587.000	2 Buku	230.492.200	2 Buku	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,88	1,00	0,36		
		Pengembangan/Peremajaan Karet Rakyat	Terlaksananya Peremajaan Karet rakyat	200 Ha	4.000 Ha	10.999.640.516	0	-	1000 Ha	2.552.046.754	1000 Ha	2.679.649.092	1000 Ha	2.813.631.546	1000 Ha	2.954.313.124	500 Ha	2.372.218.550	0	-	0		40 Ha	450.000.000	40 Ha	60.000.000	0,00	0,00		0,00		0,00	0,04	0,16	0,08	0,02		

-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13		-14		-15		-16		-17		-18		-19		-20		-21		-22
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Intensifikasi Karet	Peningkatan Produksi Karet	200 Ha	4.000 Ha	3.097.528.517	800 Ha	583.324.972	800 Ha	583.324.972	800 Ha	612.491.221	800 Ha	643.115.782	800 Ha	675.271.571	0	-	100 Ha	1.675.770.200	350 Ha	1.085.981.000	20 Ha	121.462.720	40 Ha	369.309.200	0,12	0,00	0,12	2,87	0,44	1,77	0,03	0,19	0,05	0,55	
		Pemenuhan Kelapa Sawit	Terlaksananya Pemenuhan Sawit (PSW)	50 Ha	3.000 Ha	11.785.329.124	0	0	750 Ha	2.734.335.808	750 Ha	2.871.052.598	750 Ha	3.014.035.228	750 Ha	3.165.335.490	0	-	500 Ha	2.078.490.000	40 Ha	1.274.665.000	250 Ha	1.254.665.000	0	-	0,00	0,00	1,00	0,76	0,67	0,44	0,05	0,42	0,33	0,00	
		Pengembangan Kopi	Terlaksananya Pengembangan Kopi	50 Ha	2.000 Ha	11.959.641.782	300 Ha	1.750.000.000	500 Ha	2.368.757.700	500 Ha	2.487.195.585	500 Ha	2.611.555.384	500 Ha	2.742.133.132	200 Ha	854.888.300	300 Ha	1.588.641.188	165 Ha	163.322.673	300 Ha	1.050.000.000	56 Ha	779.700.500	0,4	0,49	0,6	0,67	0,33	0,07	0,6	0,40	0,11	0,28	
		Intensifikasi Kopi	Peningkatan Produksi Kopi	50 Ha	1.000 Ha	982.110.759	0	0	250 Ha	227.861.317	250 Ha	239.254.383	250 Ha	251.217.103	250 Ha	263.777.957	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Terlaksananya kasus GUP	Terselenggaranya kasus GUP	29 Kasus	15 Kasus	939.357.313	3 Kasus	170.000.000	3 Kasus	178.500.000	3 Kasus	187.425.000	3 Kasus	196.796.250	3 Kasus	206.636.063	3 Kasus	158.823.300	2 Kasus	150.000.000	2 Kasus	132.642.950	2 Kasus	216.700.000	2 Kasus	91.000.000	1,00	0,93	0,66	0,84	0,66	0,71	0,66	1,10	0,66	0,44	
		Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana alam, Dampak lingkungan serta pemertanahan penerapan PLTB	Pencegahan dan Penanggulangan bencana Kebakaran Kebun dan Lahan	9 Kab	9 Kab	3.867.941.875	9 Kab	700.000.000	9 Kab	735.000.000	9 Kab	771.750.000	9 Kab	810.337.500	9 Kab	850.854.375	9 Kab	607.189.900	9 Kab	345.650.000	9 kab / 5 ha	185.834.451	9 Kab	111.180.000	9 Kab	150.000.000	1,00	0,87	1,00	0,47	1,00	0,24	1,00	0,14	1,00	0,18	
		Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun	Pengelolaan Lahan dan Kebun	3 Kab	3 Kab	1.576.250.000	0	-	0	-	9 Kab	500.000.000	9 Kab	525.000.000	9 Kab	551.250.000	0	-	0	-	0	-	9 Kab	177.635.000	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,34	0,00	0,00	
		Pengembangan sarana irigasi /TAM dan Optimasi Lahan Perkebunan	Terbangunnya sarana irigasi, Tata Kelola Air yang baik	100 Unit	1100 Unit	7.154.310.995	275 Unit	1.294.749.988	275 Unit	1.359.487.487	275 Unit	1.427.461.862	275 Unit	1.498.834.955	275 Unit	1.573.776.703	275 Unit	1.111.440.000	80 Unit	259.993.000	97 unit	466.113.801	73 Unit	711.423.300	2 kab/70 unit	40.000.000	1,00	0,86	0,29	0,19	0,35	0,33	0,27	0,47	0,25	0,03	
		Pengembangan/Perbaikan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya JUT	13 Km	88 Km	21.411.821.094	13 Km	3.875.000.000	15 Km	4.068.750.000	15 Km	4.272.187.500	15 Km	4.485.796.875	15 Km	4.710.086.719	13 Km	2.907.085.950	10 Km	2.031.228.000	2,5 km	307.647.700	4,5 Km	3.737.272.000	6,5 Km	2.620.000.000	0,87	0,75	0,67	0,50	0,17	0,07	0,3	0,83	0,43	0,56	
		Pengembangan Asosiasi Petani Perkebunan	Berkembangnya Asosiasi Petani Perkebunan	3 Asosiasi	3 Asosiasi	584.113.750	3 Asosiasi	110.000.000	3 Asosiasi	110.000.000	3 Asosiasi	115.500.000	3 Asosiasi	121.375.000	3 Asosiasi	127.338.750	3 Asosiasi	98.924.200	3 Asosiasi	72.685.000	3 Asosiasi	68.768.000	0	0	-	0	1,00	0,90	1,00	0,66	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		fasilitas kerjasama antar lembaga petani dan pelaku usaha komoditi perkebunan	Terlaksananya Pelatihan dan Penilaian Petani	3 Poktan	15 Poktan	2.210.252.500	5 Poktan	400.000.000	5 Poktan	420.000.000	5 Poktan	441.000.000	5 Poktan	463.050.000	5 Poktan	486.202.500	5 Poktan	385.920.000	5 Poktan	340.375.900	5 Poktan	386.085.000	5 Poktan	688.575.735	4 Poktan	400.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,88	1,00	1,49	0,8	0,82	
		permbudayaan kelembagaan petani perkebunan	Penguatan Kelembagaan petani Perkebunan	4 Poktan	1.250 Org	2.252.081.529	250 Org	407.570.000	250 Org	427.948.500	250 Org	449.345.925	250 Org	471.813.221	250 Org	495.403.882	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pengembangan dan Diversifikasi usaha tan tembakau	Peningkatan Usaha Tembakau	5 Poktan	25 Poktan	1.450.000.000	0	-	0	-	-	-	100 Ha	700.000.000	100 Ha	750.000.000	0	-	0	-	0	-	100 Ha	1.096.229.625	100 Ha	347.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,57	1,00	0,46	
		Pembinaan, Pengamatan, Regeneratif OPT Perkebunan dan Operasional LUPPT, UPTD dan LH	Terlaksananya Bimtek/Pelatihan	100 Orang	1000 orang	1.381.407.813	200 orang	250.000.000	200 orang	262.500.000	200 orang	275.625.000	200 orang	289.406.250	200 orang	303.876.563	200 orang	407.710.680	200 orang	250.095.000	200 orang	705.988.000	200 orang	775.505.000	200 orang	444.992.466	1,00	1,63	1,00	0,95	1,00	2,56	1,00	2,68	1,00	1,46	
		Bimbingan Teknologi Perbanyakan dan Aplikasi Agensi Hayati Bagi Petani Provinsi Jambi	Terlaksananya Bimtek/Pelatihan Perbanyakan Agensi Hayati	100 Orang	1.220 Orang	1.105.126.250	200 orang	200.000.000	200 orang	210.000.000	200 orang	220.500.000	200 orang	231.525.000	200 orang	243.101.250	200 orang	200.000.000	200 orang	409.401.000	200 orang	308.257.000	200 orang	245.350.000	200 orang	100.000.000	1,00	1,00	1,00	1,95	1,00	1,40	1,00	1,06	1,00	0,41	
		Pembangunan Kebun Induk / Entres	Terbangunnya kebun Induk/ Kebun Entres	0	6 Ha	788.125.000	0	-	2 Ha	250.000.000	2 Ha	262.500.000	2 Ha	275.625.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pembelahan Kebun Induk / Entres	Terpeptiharanya kebun Induk/ Kebun Entres	5 Ha	10 Ha	1.406.382.607	0	-	5 Ha	326.297.406	8,5 Ha	342.612.276	8,5 Ha	359.742.890	8,5 Ha	377.730.035	0	-	5 Ha	100.000.000	8,5 Ha	201.212.562	8,5 Ha	210.674.000	8,5 Ha	160.000.000	0,00	0,00	1,00	0,31	1,00	0,59	1,00	0,59	1,00	0,42	
		Pembibitan Tanaman Perkebunan	Terbangunnya kebun Pembibitan	10 Ha	800.000	13.814.078.125	200.000 kecambah	2.500.000.000	200.000 kecambah	2.625.000.000	200.000 kecambah	2.756.250.000	200.000 kecambah	2.894.062.500	200.000 kecambah	3.038.765.625	200.000 kecambah	3.689.267.800	100.000 kecambah	2.900.576.674	75.000 kecambah	2.590.079.617	40.000 kecambah	1.794.128.750	40.000 kecambah	2.231.057.494	1,00	1,48	0,5	1,10	0,37	0,94	0,2	0,62	0,2	0,73	
		Pemberdayaan pelaku perbenhan tanaman perkebunan	Peningkatan SOM Penangkar	15 Penangkar	53 Penangkar	806.742.163	53 Penangkar/ Produsen	146.000.000	53 Penangkar	153.300.000	53 Penangkar	160.965.000	53 Penangkar	169.013.250	53 Penangkar	177.463.913	53 Penangkar/P produsen	144.662.100	53 Penangkar	111.446.200	53 Penangkar	109.425.000	53 Penangkar	109.445.000	53 Penangkar	60.000.000	1,00	0,99	1,00	0,73	1,00	0,68	1,00	0,65	1,00	0,34	
		Peningkatan pemberdayaan produsen benih/bibit tanaman perkebunan	Peningkatan SOM Produsen	5 Produsen	20 Produsen	387.911.250	0	-	20 Produsen	90.000.000	20 Produsen	94.500.000	20 Produsen	99.225.000	20 Produsen	104.186.250	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Peningkatan Pembinaan Pengawasan Penderitaan Penyimpanan Pupuk dan Pestisida	Pemeritaban dan peningkatan kualitas Penderitaan Pupuk dan Pestisida	11 Kab/Nota	11 Kab/Nota	1.099.660.619	11 kab/Nota	199.000.000	11 kab/Nota	208.950.000	11 kab/Nota	219.397.500	11 kab/Nota	230.367.375	11 kab/Nota	241.885.744	11 kab/Nota	174.389.800	11 kab/Nota	72.467.500	11 kab/Nota	79.194.000	11 kab/Nota	110.036.000	11 kab/Nota	50.000.000	1,00	0,88	1,00	0,35	1,00	0,36	1,00	0,48	1,00	0,21	

-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13		-14		-15		-16		-17		-18		-19		-20		-21		-22																									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
		Sosialisasi Penerapan Teknologi Pembangunan Perkebunan	Tersuluhnya Teknologi Pembangunan Perkebunan	200 Orang	1.000 Org	409.461.875	0	-	250 orang	95.000.000	250 orang	99.750.000	250 orang	104.797.500	250 orang	109.974.375	0	-	200 Org	89.168.000	200 Org	80.637.500	200 Org	84.710.000	100 Org	60.000.000	1,00	0,00	1,00	0,94	1,00	0,81	1,00	0,81	0,5	0,55																										
		Pengawasan dan Peredaran Mutu Benih Perkebunan	Terjaminnya kualitas mutu Benih/Bibit	11 Kab/kota	11 Kab/kota	2.486.534.063	11 Kab/kota	450.000.000	11 Kab/kota	472.500.000	11 Kab/kota	496.125.000	11 Kab/kota	520.931.250	11 Kab/kota	546.977.813	11 Kab/kota	444.602.000	11 Kab/kota	260.000.000	11 Kab/kota	241.650.000	11 Kab/kota	265.000.000	11 Kab/kota	100.000.000	1,00	0,99	1,00	0,55	1,00	0,49	1,00	0,51	1,00	0,18																										
		Pengembangan Mutu benih Perkebunan	Peningkatan Kualitas Benih/Bibit	11 Kab/kota	11 Kab/kota	1.468.823.299	11 Kab/kota	265.820.000	2 Komoditi	279.111.000	2 Komoditi	293.066.550	2 Komoditi	307.719.878	2 Komoditi	323.105.871	2 Komoditi	242.884.000	2 Komoditi	220.000.000	2 Komoditi	296.464.279	2 Komoditi	315.000.000	1 Komoditi	200.000.000	1,00	0,91	1,00	0,79	1,00	1,01	1,00	1,02	0,5	0,62																										
		Eksplorasi Inokulum Agens Hayati Potensial	Tertelaksananya Eksplorasi inokulum Agens Hayati	3 Komoditi	4 Komoditi	818.923.750	0	-	1 Komoditi	190.000.000	1 Komoditi	199.500.000	1 Komoditi	209.475.000	1 Komoditi	219.948.750	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		Perbanyakan dan Penyebaran Agens Hayati Tricoderma sp Untuk pengendalian penyakit jamur akar Putih pada tanaman karet, kakao dan kopi	Tertelaksananya Eksplorasi inokulum Agens Hayati Potensial	3 Komoditi	9 Kab	1.436.664.125	9 Kab	260.000.000	9 Kab	273.000.000	9 Kab	286.650.000	9 Kab	300.982.500	9 Kab	316.031.625	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		Dukungan Teknologi Perlindungan Perkebunan	Tertelaksananya penerapan Teknologi Perlindungan Perkebunan	9 Poktan	9 Poktan	1.105.126.250	9 Poktan	200.000.000	9 Poktan	210.000.000	9 Poktan	220.500.000	9 Poktan	231.525.000	9 Poktan	243.101.250	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian(Perkebunan.	Terkendalanya OPT	9 Kab	9 Kab	2.252.858.874	9 Kab	407.710.680	9 Kab	428.096.214	9 Kab	449.501.025	9 Kab	471.976.076	9 Kab	495.574.880	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
		Rempah dan Penyegar Komoditi Perkebunan	Terselenggara Kebun Rempah dan Penyegar	0	20 Ha	700.000.000	0	-	0	-	0	-	25 Ha	350.000.000	25 Ha	350.000.000	0	-	0	-	0	-	20 Ha	372.800.000	20 Ha	310.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	1,07	0,8	0,89																									
8.	Peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran Produk Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Nilai Tambah, Daya saing dan pemasaran produk perkebunan																																																												
		Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan	Peningkatan kualitas olahan hasil Perkebunan	6 Poktan	30 Poktan	8.761.855.332	6 Poktan	1.585.675.000	6 Poktan	1.664.958.750	6 Poktan	1.748.206.688	6 Poktan	1.835.617.022	6 Poktan	1.927.397.873	6 Poktan	1.521.270.242	6 Poktan	2.485.943.461	6 Poktan	2.513.510.329	6 Poktan	2.477.280.000	9 Unit	1.506.950.000	1,00	0,96	1,00	1,49	1,00	1,44	1,00	1,35	1,00	0,78																										
		Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model-UPPB)	Terselenggara Sarana Pengolahan Mutu Hasil Perkebunan	5 komoditi	5 komoditi	1.270.895.188	4 Komoditi	230.000.000	4 Komoditi	241.500.000	4 Komoditi	253.575.000	4 Komoditi	266.253.750	4 Komoditi	279.566.438	4 Komoditi	153.978.650	4 Komoditi	344.608.200	4 Komoditi	251.520.580	4 Komoditi	286.996.000	4 Unit	62.250.000	1,00	0,67	1,00	1,43	1,00	0,99	1,00	1,08	1,00	0,22																										
		Pengawasan Tataaniaga TBS Kelapa Sawit dan Bakar	Terselenggara data harga TBS dan Bakar	52 Minggu	260 Minggu	1.679.791.900	52 Minggu	304.000.000	52 Minggu	319.200.000	52 Minggu	335.160.000	52 Minggu	351.918.000	52 Minggu	369.513.900	52 Minggu	249.714.000	52 Minggu	467.100.000	52 Minggu	363.291.375	52 Minggu	337.320.000	52 Minggu	119.000.000	1,00	0,82	1,00	1,46	1,00	1,08	1,00	0,96	1,00	0,32																										
		Promosi dan Pengembangan Peluang pasar	Peningkatan Usaha Perkebunan	5 kali even	25 kali even	1.836.198.208	5 kali even	332.305.600	5 kali even	348.920.880	6 kali even	366.366.924	6 kali even	384.685.270	8 kali even	403.919.534	4 kali even	320.333.540	4 kali even	245.695.700	4 kali even	358.430.975	4 kali even	461.775.000	6 kali	155.000.000	1,00	0,96	1,00	0,70	1,00	0,98	0,8	1,20	1,2	0,38																										
						168.677.635.997		23.549.678.628		30.432.342.224		35.830.823.598		39.369.364.778		39.495.426.767		20.583.081.745		22.426.759.213		19.260.983.008		27.108.513.680		13.734.453.025		0,87		0,74		0,54		0,69		0,35																										
Rata-rata capaian kinerja(%)																											0,55		0,65		0,73		0,79		0,68																											
Predikat Kinerja																											R		S		S		S		S																											

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, baik internal maupun eksternal.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup kualitas sumberdaya manusia, kemampuan anggaran dan kebijakan Pemerintah. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah tuntutan masyarakat dan globalisasi pasar dunia yang berkembang. Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka Dinas Perkebunan selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

2.6 Capaian penting Renstra periode 2016-2021

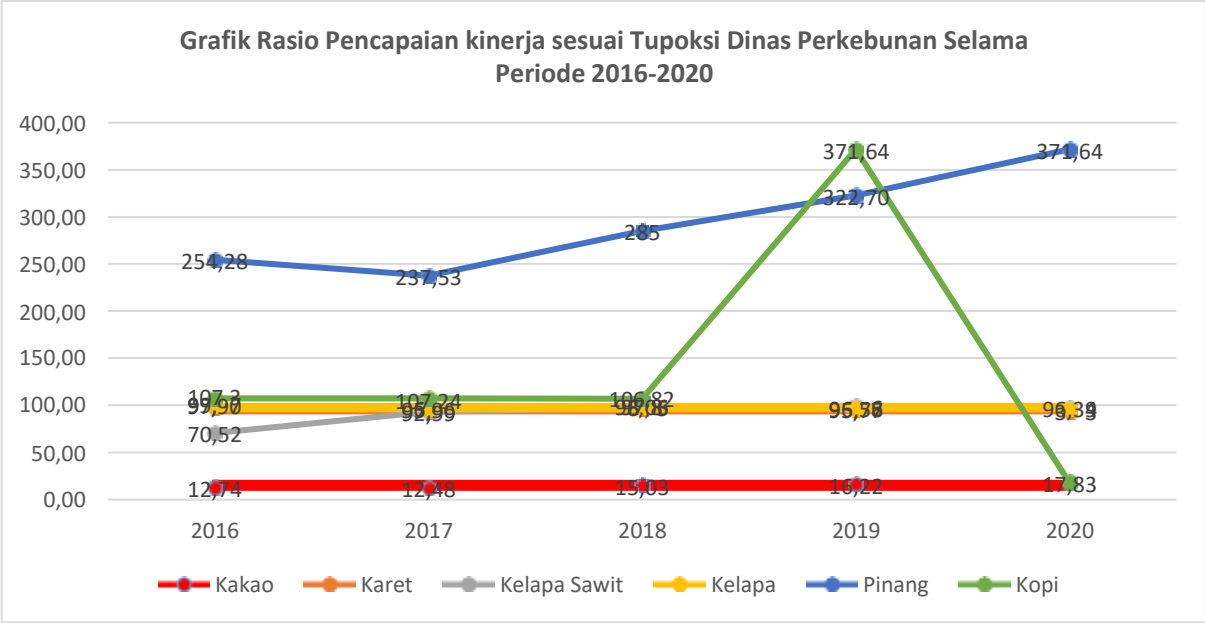
Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. (T-C 23), dimana terdapat perubahan target dan indikator kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi khususnya komoditi Perkebunan yang diselaraskan juga dengan Program Nasional. Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dinas Perkebunan tahun 2020 yakni :

a. Komoditi Perkebunan

- Indikator kinerja komoditi perkebunan adalah produksi dimana untuk komoditi kelapa sawit, karet, kelapa, dan kakao rata-rata Capaian kinerja mencapai lebih kurang dari 91,50 – 97,12 persen, kecuali untuk komoditi Kakao hanya mencapai rata-rata 14,86 persen, sedangkan komoditi kopi dan pinang mencapai rata-rata 106,57-304,22 persen melebihi target yang ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi pada komoditi perkebunan antara lain, petani pekebun belum sepenuhnya menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) secara konsisten, petani pekebun masih ada menggunakan bibit palsu (bibit ilegal/tidak bersertifikat dan tidak bermutu), perubahan harga jual komoditi perkebunan yang mempengaruhi motivasi petani dalam melaksanakan intensitas perawatan kebun dan panen,

bertambahnya luasan tanaman tidak menghasilkan/rusak dan tidak produktif, aspek kelembagaan petani dan penyuluh pertanian yang belum berfungsi dengan baik dan optimal dalam pemberdayaan petani serta perubahan iklim yang berpengaruh terhadap serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan kebakaran lahan perkebunan.

- Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi kelapa adalah tanaman tidak dipanen oleh petani disebabkan harga jual yang rendah. Petani merasa rugi karena ongkos panen lebih tinggi dari harga jual. Selain itu juga petani kelapa belum menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) karena keterbatasan modal dan SDM, tanaman kelapa banyak yang sudah tua dan rusak yang sangat berpengaruh pada jumlah produksi dan produktivitas.
- Sedangkan permasalahan pada tanaman karet adalah petani karet belum menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) karena keterbatasan modal dan SDM, tanaman sudah banyak yang tua dan rusak akibat kurangnya perawatan, terdapat harga jual hasil olahan karet yang rendah menyebabkan petani karet tidak melakukan intensitas perawatan dan panen serta petani karet melakukan alih komoditi lain.
- Permasalahan pada tanaman kakao dikarenakan belum adanya bibit yang bersertifikat / bibit unggul seperti tanaman kelapa sawit / karet yang mempunyai produktivitas tinggi sehingga petani menanam tanaman kakao dari hasil anakan tanaman kakao disekitar kebun, selain itu perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan perilaku Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman kakao. Kemudian, terdapat kondisi tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, kurangnya intensitas pemeliharaan kebun, serangan OPT dan belum diimplementasikannya Good Agricultural Practices (GAP) secara konsisten.



b. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan

Usaha untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditi tanaman perkebunan dilakukan melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, alat pasca panen maupun promosi yang dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang terdaftar di Provinsi Jambi masih berjalan secara maksimal. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor Perkebunan belum memenuhi target yang diinginkan. NTP Provinsi Jambi tahun 2017 terealisasi sebesar 115,30 naik sebesar +4,82 persen dari target 110,0; tahun 2018 terealisasi sebesar 102,47 atau menurun -14,61 persen dari target 120; tahun 2019 terealisasi 109,98 atau menurun sebesar -8,35 persen; tahun 2020 terealisasi 124,27 atau naik + 3,56 persen.

NTP Sub Sektor Perkebunan pada tahun 2020 sebesar 124,27 % menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani pekebun tercapai karena harga yang diterima petani pekebun lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh petani pekebun untuk biaya produksi usahatannya. Kenaikan NTP ini didukung oleh peningkatan komoditi ekspor komoditi perkebunan yaitu kelapa sawit, kopi, kayu manis dan pinang. Sedangkan pada tahun 2017-2019 walaupun nilai NTP sub sektor perkebunan mengalami penurunan pada tahun 2019, namun nilai NTP masih diatas 100 yang berarti nilai harga yang diterima petani masih lebih tinggi dari biaya produksi yang dikeluarkan petani pekebun.

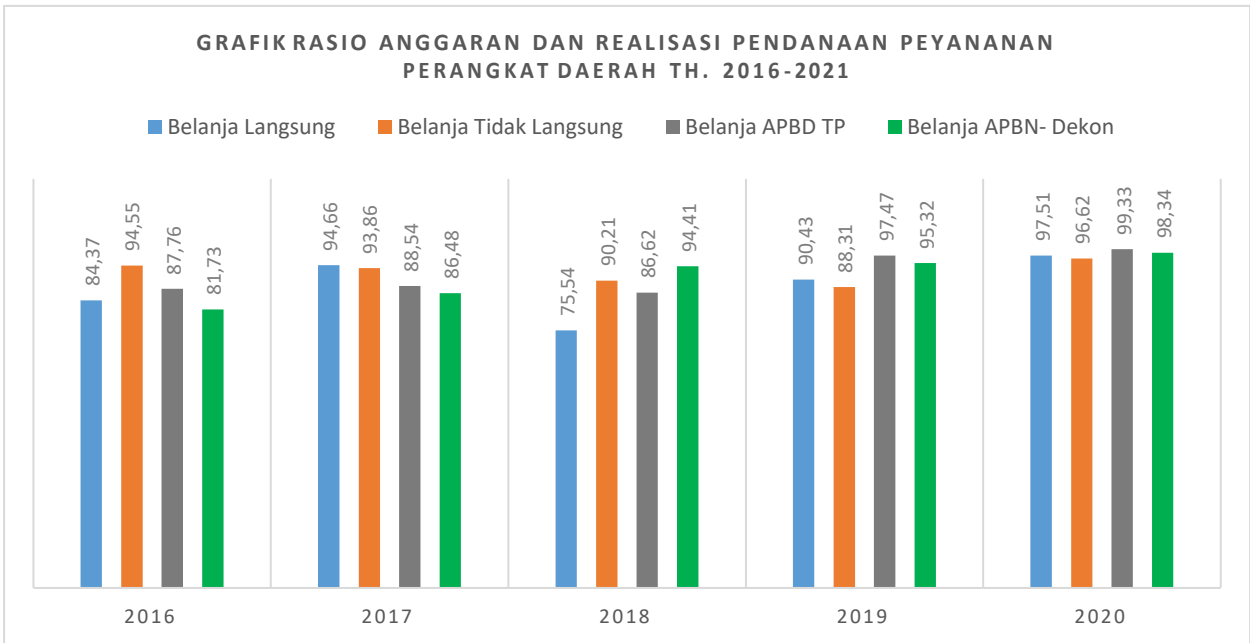
Untuk mempertahankan kondisi NTP sub sektor perkebunan ini perlu dan menetapkan program dan kegiatan komoditi perkebunan yang berorientasi ekspor yang dimulai dari program kegiatan di sektor hulu, kelembagaan dan sektor hilirisasi. Sehingga diharapkan visi misi Gubernur Jambi periode 2021-2024 dapat tercapai.

(Tabel 4. T - C.23) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Kondisi Kinerja pada	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2016	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan produksi komoditi unggulan Perkebunan																			
	- Kelapa Sawit (ton)	-	-	-	1.669.652	1.669.652	1.721.344	1.774.431	1.829.260	1.885.785	1.177.560	1.552.543	1.683.532	1.813.870	1.830.035	70,52	92,99	97,80	99,16	97,04
	- Kelapa (ton)	-	-	-	108.934	108.934	110.230	111.542	112.869	114.212	108.471	104.528	108.087	107.724	108.789	99,57	95,96	98,06	96,58	96,39
	- Karet (ton)	-	-	-	338.772	338.772	347.986	357.451	367.174	377.161	331.663	337.544	344.413	351.651	353.145	97,90	96,99	96,35	95,77	93,63
	- Pinang (ton)	-	-	-	5.302	5.302	4.700	4.167	3.695	3.276	13.482	12.594	13.395	13.447	13.732	254,28	237,53	285	322,70	371,64
	- Kopi (ton)	-	-	-	13.583	13.583	14.456	15.256	16.056	16.856	14.064	14.566	15.393	16.815	16.379	107,30	107,24	106,82	110,22	102,01
	- Kakao (ton)	-	-	-	5.632	5.632	5.335	5.050	4.786	4.632	718	703	802	819	826	12,74	12,48	15,03	16,22	17,83
	- Kayu Manis (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.276	56.253	56.681	56.826	57.072	-	-	-	-	-
2	Persentase peningkatan Nilai Tukar Petani																			
	NTP Sub Sektor Perkebunan	-	-	-	110,0	110,0	110,0	120,0	120,0	120,0	111,78	115,30	102,47	109,98	124,27		-	-	4,25	18,37

TABEL.5. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	11.110.628.783	11.858.140.950	13.672.767.214	16.516.413.862	13.828.681.017,37	10.504.767.339	11.130.328.756	12.334.796.705	14.585.537.926	13.360.796.373,89	94,55	93,86	90,21	88,31	96,62	8.19	-7,57
Belanja Langsung	26.836.923.086	22.154.344.844,50	21.599.083.697	26.987.077.960,82	13.734.453.025	22.642.362.140	20.970.473.068	16.315.788.449	24.404.023.236	13.392.454.974	84,37	94,66	75,54	90,43	97,51	13,90	-12,21
APBN Dekonsentrasi	3.649.888.000	662.510.000	2.137.800.000	1.196.650.000	1.340.600.000	2.983.169.895	572.929.718	2.018.275.658	1.140.612.973	1.318.452.580	81,73	86,48	94,41	95,32	98,34	11,88	-10,61
APBN TP	13.811.751.000	27.633.456.000	23.594.334.000	34.634.646.000	14.768.672.000	12.121.658.652	24.467.947.157	20.436.603.753	33.760.120.500	14.669.732.450	87,76	88,54	86,62	97,47	99,33	8,52	-7,85



Berdasarkan tabel.3. (Tabel.T.C 23) tentang Pencapaian kinerja dinas Perkebunan Provinsi Jambi dari tahun 2016 – 2020 bahwa ; Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Perkebunan berhasil dipertahankan diatas nilai 100 walaupun berfluktuasi. NTP Provinsi Jambi tahun 2017 terealisasi sebesar 115,30 atau naik +4,82 persen dari target 110,0; tahun 2018 terealisasi sebesar 102,47 atau menurun -14,61 persen dari target 120; tahun 2019 terealisasi 109,98 atau menurun -8,35 persen; tahun 2020 terealisasi 124,27 atau naik + 3,56 persen.

c. Realisasi dan serapan anggaran APBD dan APBN.

Berdasarkan data Tabel 3. (Tabel.T.C.24) diatas, dapat diketahui bahwa realisasi dan anggaran APBD dan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

- Pada belanja tidak langsung terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana adanya perubahan terhadap jumlah PNS (Pegawai pensiun dan Pegawai mutasi) dan perubahan terhadap besar tunjangan pegawai. Rasio antara realisasi dan pagu anggaran belanja tidak langsung cukup baik dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,19 persen, namun dari sisi realisasi serapan mengalami penurunan sebesar -7,57 persen, hal ini akibat dampak penganggaran pada tahun 2020 pada saat bencana nasional berupa wabah Pandemi Covid-19, telah dilakukan Rasionalisasi kembali melalui Refocusing APBD TA.2020.
- Sedangkan belanja langsung pada tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran (Rasionalisasi) yang cukup besar dari Rp. 27.722.045.428 menjadi Rp. 13.734.453.025,-. Sampai akhir tahun anggaran realisasi serapan dana sebesar 97,51 persen. Adapun capaian serapan anggaran antara realisasi dan pagu anggaran murni rata-rata pertumbuhannya 13,90 persen dan realisasi serapan mengalami penurunan sebesar – 12,21 persen. Namun

jika dilihat dari pagu rasionalisasi, capaian kinerja adalah sebesar 82,19 % dan pelaksanaan fisik sesuai dengan progres yang telah ditetapkan.

- Rasio antara realisasi dan anggaran untuk Dana APBN Dekonsentrasi sangat tinggi mencapai 98,34, sisanya merupakan efisiensi atau sisa kontrak. Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran APBN Dekonsentrasi sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -10,61 persen.
- Dana APBN Tugas Pembantuan, capaian terhadap Rasio antara realisasi dan pagu anggaran adalah cukup baik dimana pada tahun 2020 mencapai 99,33 persen sisa anggaran merupakan sisa kontrak, sedangkan rata-rata pertumbuhan anggarannya mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -7,85 persen.

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Kinerja pembangunan perkebunan secara nasional selama 3 tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Indikator ekonomi makro seperti Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Neraca Perdagangan, dan Penyerapan Tenaga Kerja Rakyat menunjukkan trend positif.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan yang digunakan sebagai pedoman di dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan potensi wilayah maka arahan pengembangan tanaman perkebunan untuk pembangunan tahun ke depan lebih difokuskan pada optimalisasi penggunaan benih dan bibit unggul berkualitas, intensifikasi dan diversifikasi, peremajaan tanaman, penggunaan lahan melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) pekebun serta upaya mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi petani/pekebun yang terdampak Pandemi Covid-19 sejak dua tahun terakhir ini.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan masih diperlukan sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan

lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Dalam KLHS terdapat 6 aspek kajian, yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA);
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tanaman perkebunan terkait dengan 6 aspek tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan.
2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunnya nilai kompetitif
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam.
5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola SDA
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat
7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung (alat/mekanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang akan diterapkan
8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim.
9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS, tidak semuanya dapat dikerjakan dan hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan, terutama dalam hal pencapaian peningkatan luas tanam, luas panen, jumlah produksi dan produktifitas tanaman perkebunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan Dinas Perkebunan berbagai tantangan dan peluang sebagai berikut :

➤ **Tantangan**

- Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan masih dibawah potensi teknis.
- SDM pelaku usaha perkebunan dan Kelembagaan masih rendah
- Akses petani terhadap permodalan dan Sarana prasarana produksi serta pemasaran masih terbatas.
- Isu lingkungan hidup (kesuburan tanah), globalisasi dan anomaly iklim serta penerapan teknologi masih terbatas.

➤ **Peluang**

- Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk tanaman perkebunan
- Adanya Kebijakan Nasional tentang program Grasida, Gratieks, Food Estate, Mitigasi, dan antisipasi perubahan iklim.
- Adanya potensi Kearifan lokal terkait komoditi unggulan daerah Jambi (Kelapa sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi, Pinang, Kakao, Kayu Manis dan Tembakau) serta Lahan yang Potensial.
- Tersedianya Teknologi pengolahan dan Sarana pendukung serta industri pengolahan hasil perkebunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perkebunan maka indikator program yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya produksi tanaman unggulan (kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, pinang, kakao, dan kayu manis)
2. Meningkatnya produktivitas tanaman unggulan (kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, pinang, kakao, dan kayu manis)
3. Terciptanya pembangunan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan oleh pelaku utama maupun pelaku usaha perkebunan.
4. Meningkatnya posisi tawar petani melalui pengembangan kawasan tanaman perkebunan berbasis korporasi petani
5. Meningkatnya peran kelembagaan petani dalam mendukung penerapan Good Agriculture Practices (GAP) secara konsisten oleh petani pekebun
6. Terciptanya industri hilirisasi yang mengarah kepada konsep korporasi petani
7. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (aparatur, penyuluh dan petani pekebun)

Beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja program tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni :

1. Aspek Teknis

1.1 Luas tanaman tua dan rusak (TTM/TR) semakin bertambah

Potensi luas perkebunan di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 6. Dari luas perkebunan terdapat luas komoditas tanaman perkebunan tanaman tua dan rusak (TTM/TRR) dari total luas perkebunan di Provinsi Jambi sebagaimana disajikan pada Tabel 7. Terdapat TTR yang berkurang pada tahun berikutnya adalah karena dua kemungkinan, pertama telah dilakukan peremajaan kembali, dan kedua atau telah dikonversi tanamannya berubah menjadi tanaman jenis lainnya.

Tabel.6. Luas Perkebunan 7 (tujuh) komoditi unggulan di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

No	Komoditi	Luas (Ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Karet	668.919	669.521	673.350	671.319	669.331
2	Kelapa Sawit	535.827	791.025	1.039.920	1.079.334	1.041.434
3	Kelapa Dalam	118.978	118.540	118.341	118.779	119.100
4	Kopi	26.286	28.441	29.780	27.274	29.438
5	Pinang	19.969	20.694	20.985	21.531	21.819
6	Kakao	2.270	2.354	2.438	2.574	2.681
7	Kayu Manis	46.289	46.132	45.924	45.805	45.699
Jumlah		1.418.538	1.676.707	1.930.738	1.966.616	1.929.502

Sumber : Statistik Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2020;

Berdasarkan tabel 6 diatas, bahwa Luas lahan perkebunan setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan seluas 37.114 Ha atau sebesar 1,92 %, hal ini disebabkan adanya penurunan Luas lahan dari komoditi Karet sebesar 0,30 %, Kelapa Sawit menurun 3,6 %, dan komoditi Kayu Manis sebesar 0,23 %. Menurut data statistik Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2019 tercatat luas lahan perkebunan di Provinsi Jambi mencapai 1.936.645 ha, sedangkan Luas lahan 7 komoditi unggulan perkebunan Provinsi Jambi tercatat seluas 1.929.502 ha, sisanya seluas 7.143 ha merupakan komoditi perkebunan lainnya.

Tabel 7. Luas Tanaman Tidak Menghasilkan dan Rusak (TTM/TR) Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

No	Komoditi	Luas (Ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Karet	111.516	112.660	109.982	104.098	101.445
2	Kelapa Sawit	15.606	24.185	27.054	34.794	119.281
3	Kelapa	18.663	18.179	18.051	17.970	17.890
4	Kopi	2.803	3.004	2.988	2.860	2.742
5	Pinang	783	792	831	839	847
6	Kakao	236	231	259	266	308
7	Kulit Kayu Manis	658	657	742	764	734
Jumlah		150.265	159.708	159.907	161.591	234.247

Sumber : Statistik Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2020;

Berdasarkan tabel 7 diatas bahwa Luas tanaman Tua dan Rusak (TTM/TR) komoditi perkebunan setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,39 %, kecuali pada tahun 2020 mengalami peningkatan luas tanaman Tua dan Rusak yang sangat tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi terutama komoditi Kelapa Sawit rakyat mengalami peningkatan TTM/TR mencapai 72.656 Ha atau sebesar 44,9 %.

Peningkatan luas TTM/TR ini sejalan dengan bertambahnya usia tanaman dari kebun eks plasma perusahaan kelapa sawit, adanya konflik perusahaan yang menyebabkan terlantarnya, faktor iklim serta telah dilakukan Update data Statistik Perkebunan secara online pada tahun 2019.

Penambahan luasan tanaman tidak menghasilkan / tanaman rusak ini sangat mempengaruhi jumlah produksi dan produktifitas tanaman perkebunan yang diusahakan oleh petani pekebun. Hal ini dengan sendirinya mempengaruhi pendapatan yang diperoleh petani pekebun.

Adanya dukungan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dilaksanakan sejak tahun 2017 sangat membantu petani pekebun untuk meremajakan kebun kelapa sawitnya yang sudah tidak produktif lagi. Sampai dengan saat ini program PSR di Provinsi Jambi sudah tercatat realisasinya seluas 15.713, 10 Ha dengan target seluas 81.033 Ha sehingga masih tersisa tanaman sawit tidak menghasilkan/rusak (TTM/TR) seluas 65.320 Ha.

1.2 Masih rendahnya capaian produksi dan produktivitas tanaman perkebunan rakyat

Produksi perkebunan di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel.8 dibawah ini, secara angka statistik mengalami peningkatan, namun bila dilihat dari sisi produktivitas masing-masing komoditi perkebunan tersebut masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan angka Potensi Baku Teknis Nasional, kecuali untuk komoditi Pinang dan Kayu Manis produktivitasnya tercapai optimal diatas Potensi Baku Teknis Nasional, sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 8. Produksi 7 komoditi unggulan Perkebunan di Provinsi Jambi 2015-2019

No	Komoditi	Produksi (Ton)					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Karet	331.663	337.544	344.413	351.651	353.145	Slab
2	Kelapa Sawit	1.177.560	1.552.543	1.683.532	1.813.870	1.830.035	CPO
3	Kelapa	108.471	104.528	108.087	107.724	108.789	Kopra
4	Kopi	13.537	14.566	15.393	16.815	16.379	Biji Kering
5	Pinang	13.482	12.594	13.395	13.447	13.732	Biji kering
6	Kakao	718	703	802	819	826	Biji kering
7	Kulit Kayu Manis	56.276	56.253	56.681	56.826	57.072	Kulit/Stick
Jumlah		1.701.707	2.078731	2.222.303	2.361.152	2.379.978	

Sumber : Data Olahan, dan Data Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2015-2019;

Tabel 9. Produktivitas 7 komoditi Unggulan Perkebunan Provinsi Jambi

No	Komoditi	Satuan	Rata-rata Produktivitas Tahun 2015-2019 (Kg/Ha/Tahun)	Potensi Teknis Produktivitas (Kg/Ha/Tahun)	Keterangan
1.	Karet : - Karet rakyat	Slab	930,4	1.760	Rendah
2.	Kelapa : - Kelapa rakyat	Kopra	1.216,4	1.500	Rendah
3.	Kelapa sawit : - Sawit rakyat	CPO	2.554,5	8.000	Rendah
4.	Kopi rakyat : - Kopi Robusta - Kopi Arabika - Kopi Liberika	Biji kering	918 602 565	1.300 1.000	Rendah
5.	Pinang	Biji kering	889	400	Optimal
6.	Kakao	Biji Kering	587,6	1.000	Rendah
7.	Kayu Manis	Kulit Kering	2.173,4	2.000	Optimal

Sumber : Data olahan, dan Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2020;

Rendahnya produktivitas akan berpengaruh kepada perolehan pendapatan petani pekebun. Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, yaitu sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penggunaan benih unggul yang bermutu/ bersertifikat;
- b. Belum terlaksananya penggunaan sarana produksi yang tepat teknis akibat keterbatasan modal dan SDM;
- c. Belum terlaksananya Good Agriculture Practices (GAP) secara konsisten;
- d. Pengendalian OPT belum dilakukan secara terpadu dan ramah lingkungan;
- e. Adanya gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- f. Lambatnya kegiatan Replanting terhadap luasan tanaman tidak menghasilkan dan tanaman rusak (TTM/TR).
- g. Dukungan penerapan teknologi budidaya yang rendah;
- h. Terbatasnya SDM petani, aparat dan petugas lapangan;
- i. Perubahan iklim.

1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana belum memadai

Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan juga masih jauh dari yang diharapkan, baik berupa alat mesin pertanian maupun sarana pengairan serta jalan produksi kebun. Pada beberapa daerah hilir mengalami kerusakan tanggul, saluran dan pintu klep (trio tata air), sehingga menyebabkan intrusi air laut. Masuknya air laut menyebabkan sifat fisik, kimia dan biologi tanah rusak, dan menyebabkan pertanian dan perkebunan rusak, tidak dapat tumbuh dengan baik. Beberapa daerah pesisir selain mengalami intrusi air laut juga abrasi, yaitu kehilangan wilayah daratan akibat tergerus ombak air laut. Kondisi jalan produksi di perkebunan dengan tanah mineral juga belum memadai sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen perkebunan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

1.4 Penerapan teknologi pertanian masih rendah

Penerapan teknologi baik teknologi budidaya maupun panen dan pasca panen juga masih rendah, secara keseluruhan baru sekitar 60% dari anjuran yang ditetapkan. Penggunaan benih bermutu, teknologi pola dan jarak tanam, pengendalian Hama penyakit serta pemupukan juga masih tergolong rendah.

1.5 Ketersediaan dan pemanfaatan lahan

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan distribusinya yang tidak merata mengakibatkan daya dukung lahan terlampaui. Kondisi demikian menimbulkan terjadinya Kompetisi pemanfaatan yang kurang sehat bagi kepentingan multi sektoral yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kasus gangguan usaha perkebunan.

Status perizinan perkebunan di Provinsi Jambi mendapat pengawasan dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu termasuk dalam provinsi yang menjadi pilot project Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Telah dilakukan monitoring evaluasi perizinan perkebunan secara intensif tiap tiga bulan, dan status perizinan Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sampai dengan bulan Oktober 2019 disajikan pada Tabel 10. berikut ini;

Tabel 10. Status Data Perizinan Perkebunan Sawit di Provinsi Jambi dalam Stranas KPK tahun 2019

No.	Kabupaten / Kota	Data diterima Provinsi						Ket
		Data SK		Lampiran Peta SK		HGU/HGB		
		ILOK	IUP	ILOK	IUP	JML	LUAS (HA)	
1	Lintas Kabupaten	40	18	40	18	44	66.093,45	*)
2	Batanghari	54	27	54	27	22	45.967,17	
3	Tanjung Jabung Barat	44	27	44	27	17	29.437,68	
4	Tanjung Jabung Timur	28	9	28	9	4	4.707,21	
5	Muaro Jambi	55	44	55	44	41	50.374,30	
6	Tebo	25	18	25	18	4	12.248,71	
7	Bungo	24	16	24	16	11	17.613,57	
8	Sarolangun	42	33	42	33	4	27.370,80	
9	Merangin	18	12	18	12	2	34,0	
10	Kerinci	1	0	1	0	1	3.014,60	
11	Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL	335	211	335	211	159	256.871,48	

Sumber : Data Perusahaan Perkebunan Sawit di Provinsi Jambi, Tahun 2019;
Keterangan *) Data SK telah ada, namun belum lengkap; Data Peta telah ada, namun belum Lengkap, dan data peta belum seluruhnya dibuat dalam bentuk file shp.

Semua data perizinan perkebunan seyogyanya harus lengkap terdapat Surat Keputusan pemberi izin baik dari Ditjen Perkebunan, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dengan didukung Izin Lokasi pada awalnya, kesemuanya harus dilengkapi dengan lampiran SKnya dan peta dalam bentuk shapefile.

Berdasarkan tabel 10 diatas bahwa masih banyak Perusahaan Perkebunan Sawit yang belum maksimal melaksanakan ketentuan dan kewajibannya sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pembangunan Perkebunan. Sebanyak 186 Perusahaan Perkebunan Sawit di Provinsi Jambi dengan total izin lokasi tercatat 335 persil, dan 211 persil izin usaha perkebunan (IUP) yang telah terbit, dan sebanyak 159 HGU/HGB yang sudah terbit.

Mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 833/Kpts/dr.020/12/2019 tentang Penetapan Luas tutupan Sawit Indonesia tahun 2019, bahwa Provinsi Jambi menempati peringkat ke-7 dengan luas lahan sebesar 1.134.640 Ha, dengan rincian 23.057 Ha perkebunan BUMN, 518.869 Ha Perkebunan Swasta, dan 592.714 Ha Perkebunan rakyat. Kebun inti Perusahaan Sawit yang sudah tertanam seluas 378.921,98 Ha, yang sudah di HGU-kan seluas 275.705,79 Ha, masih terdapat selisih kebun yang belum di HGU-kan seluas 103.216,19 Ha.

Luas Lahan kebun yang belum dapat diurus HGU tersebut tentu menjadi Potensi untuk terjadi konflik kepemilikan lahan. Konflik perkebunan ini dapat berakibat pada menurunnya produksi perkebunan. Untuk itu kedepannya maka perlu dilakukan upaya

Pembinaan dan Pengawasan yang terpadu dan berkelanjutan sebagai upaya penanggulangan gangguan usaha perkebunan serta tetap berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

1.6 Industri hilir sub sektor perkebunan dan pemasarannya masih terbatas

Selain produk Kelapa sawit dan Karet yang telah diusahakan oleh industri perkebunan besar, kondisi industri hilir dari komoditas Kelapa, kakao, kopi, dan pinang serta Kulit Kayu Manis masih sangat terbatas, baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Sebagian besar ekspor yang dilakukan baru berupa bahan mentah. Untuk itu pengolahan komoditas perkebunan menjadi penting agar memberikan nilai tambah pada suatu produk, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan pasar terhadap komoditas.

Peluang pengembangan industri hilirisasi terutama untuk komoditi kelapa sawit berupa Pabrik Kelapa Sawit Mini (PKS Mini), Pabrik Industri Vegetable Oil (IVO) yang dapat menghasilkan minyak nabati / biofuel pengganti minyak non nabati, pabrik pengolahan kopi siap konsumsi, pabrik pengolahan pinang. Peluang tersebut didukung dengan bahan baku di sektor hulu yang cukup tersedia untuk pembangunan pabrik dan dikelola sendiri oleh petani pekebun dengan konsep korporasi petani.

Industri Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) saat ini berjumlah 80 unit 70 Perusahaan, pabrik pengolahan karet berjumlah 9 unit dan pabrik pengolahan kelapa 18 unit. Potensi pengolahan produk dari pohon kelapa yang bisa dilaksanakan oleh petani skala rumah tangga dengan membentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu dari air kelapa (28%) adalah dibuat nata de coco, kecap, cuka dan minuman. Dari tempurung (16%) dibuat arang batok, tepung arang, arang aktif, dan barang kerajinan alat rumah tangga berupa gayung dan sendok sayur. Dari sabut kelapa (20%) dapat dibuat keset, karpet, tali dan matras, sedangkan dari lidi (5%) dibuat sapu lidi, aneka keranjang dan piring. Hal ini berlaku juga untuk produk turunan karet, kakao, kopi, pinang dan kulit kayu manis.

Jumlah PKS di Provinsi Jambi sampai dengan 2020 disajikan pada Tabel 11. tercatat 80 unit dengan total Kapasitas sebesar 3.447 dan Kapasitas terpasang sebesar 3.342 ton TBS/Jam, sedangkan Kapasitas terpakai sebesar 2.988,48 ton TBS/Jam. 80 unit PKS tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni PKS Kebun sebanyak 55 unit dengan Kapasitas 1.872 ton TBS/Jam, dan sebanyak 25 unit PKS Non Kebun dengan Kapasitas 1.575 ton TBS/Jam.

Tabel 11. Jumlah Pabrik Kelapa Sawit di Provinsi Jambi tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PKS Kebun		PKS Non Kebun		Total	
		Jumlah	Kapasitas (Ton TBS/jam)	Jumlah	Kapasitas (Ton TBS/jam)	Jumlah	Kapasitas (Ton TBS/jam)
1	Batanghari	10	367	1	60	11	427
2	Tanjung Jabung Barat	8	345	5	300	13	645
3	Tanjung Jabung Timur	0	0	3	105	3	105
4	Muaro Jambi	18	780	3	180	21	960
5	Tebo	7	125	3	90	10	215
6	Bungo	5	300	5	615	10	915
7	Sarolangun	2	120	3	135	5	255
8	Merangin	5	180	2	90	7	270
9	Kerinci	0	0	0	0	0	0
10	Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0
11	Kota Jambi	0	0	0	0	0	0
TOTAL		55	1.872	25	1.575	80	3.447

Sumber : Statistik Perkebunan Provinsi Jambi, Tahun 2020;

Tingkat pertambahan nilai dari komoditas perkebunan sebagai produk utama baik dari segi mutu maupun jenis yang masih rendah karena belum tersedia sarana dan prasarana pendukung. Oleh karenanya perlu dilakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengolah sumber daya di daerahnya masing-masing.

2. Aspek Non Teknis

2.1 Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu kaharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi.

Sampai saat ini SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja professional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penuh dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaann tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang. Dalam penempatan para pejabat pada jabatan

struktural juga masih ditemui penempatan yang belum megacu kepada aspek *“the right man in the right place”* terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

2.2. Kapabilitas petani masih rendah

Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian dan perkebunan, oleh karena itu kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan capaian hasil pembangunan. Petani perkebunan secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian $\pm 80\%$ yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan daripada petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.

2.3 Akses petani terhadap permodalan masih terbatas

Modal adalah unsur utama dalam pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan. Sampai saat ini petani masih kesulitan untuk bisa mengakses dan menggunakan pinjaman perbankan untuk biaya produksi usahatani. meskipun pemerintah melalui pihak perbankan sudah banyak mengeluarkan skema kredit. Kendala tersebut antara lain bunga pinjaman yang masih tinggi bagi petani pekebun terutama dengan grace period lain itu juga disebabkan terbatasnya informasi, kemampuan manajerial dan pengetahuan petani, keengganan petani berurusan dengan pihak perbankan serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sehingga mereka tidak mampu memenuhinya.

2.4 Belum optimalnya pembinaan instansi teknis terkait Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak masih dianggap sebagai beban, padahal pajak merupakan kewajiban warganegara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik pembangunan daerah maupun Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut saat ini masih banyak areal perkebunan yang belum terbayar Pajak Bumi dan Bangunanya (PBB).

Berdasarkan data Statistik Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2020, Luas lahan perkebunan tercatat 1.936.645 Ha yang terdiri dari 519.224 Ha lahan kebun Perusahaan Sawit dan 1.410.431 Ha lahan kebun rakyat, 1.973 Ha lahan kebun Teh Perusahaan PTP.VI dan 500 Ha kopi PTP.VI, dan 4.517 Ha lahan kebun Karet Perusahaan. Bila disandingkan dengan data pada tabel 8 diatas, dimana penerbitan HGU/HGB Perusahaan Perkebunan Sawit di Provinsi Jambi baru tercatat 256.871,48 Ha yang sudah terbit HGU/HGB-nya sehingga masih ada peluang seluas 262.352,52 hektar yang belum membayar Pajak PBB P3 Perkebunan, artinya masih terdapat Potensi seluas 262.352,52 hektar yang belum melakukan kewajiban membayar Pajak PBB P3 Perkebunan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya penertiban perizinan perkebunan, agar teridentifikasi wajib pajak perorangan dan korporasi yang akan membayar PBB, sesuai kewajibannya.

2.5 Budaya atau kebiasaan masyarakat / petani

Teknologi budidaya sebenarnya sudah berkembang pesat, namun penerapan di tingkat masyarakat/petani belum sebagaimana yang diharapkan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya adalah budaya atau kebiasaan masyarakat. Budaya/kebiasaan ini mulai dari pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan, panen pasca panen. Mengubah kebiasaan turun menurun ini dapat diubah melalui pendampingan petani secara kontinyu oleh petugas kabupaten maupun petugas penyuluh desa.

2.6 Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor perkebunan masih berfluktuasi

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi pada bulan Maret 2021, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi Maret 2021 sebesar 122,17 atau naik 3,20 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini dikarenakan Indeks Harga yang diterima petani (It) naik sebesar 3,7 persen namun Indeks Harga yang dibayar petani (Ib) naik hanya 0,16 persen. NTP Provinsi Jambi untuk masing-masing subsektor berfluktuasi tercatat 97,49 untuk subsektor Tanaman Pangan; 104,35 untuk subsektor Hortikultura; 128,48 untuk subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat.

Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Perkebunan masih berfluktuasi namun masih diatas nilai 100. NTP Provinsi Jambi tahun 2017 terealisasi sebesar 115,30 atau naik +4,82 persen dari target 110,0; tahun 2018 terealisasi sebesar 102,47 atau menurun -14,61 persen dari target 120; tahun 2019 terealisasi 109,98 atau menurun -

8,35 persen; tahun 2020 terealisasi 124,27 atau naik + 3,56 persen. Dari realisasi NTP tahun 2017-2019 tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan petani sudah dapat tercapai walaupun masih berflutuasi.

2.7 Perubahan iklim global

Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan (*El-Nino dan La-Nina*), sirkulasi angin, kenaikan muka air laut, rusaknya terumbu karang merupakan wujud dari pada perubahan iklim. Demikian juga dengan tingkat pencemaran lingkungan yang harus diwaspadai.

Di Provinsi terdapat dua kali siklus kemarau, yaitu bulan Februari dan bulan Agustus, dan pada kondisi panas tersebut terdapat situasi yang rawan kebakaran pada lahan dan hutan. Di samping itu 60% areal Provinsi Jambi merupakan areal bergambut yang rawan terhadap kebakaran.

2.8 Laju Pertumbuhan penduduk relatif tinggi

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi termasuk pada kategori yang tinggi, dimana rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi selama 10 tahun (2010-2020) adalah sebesar 1,34 %. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Jambi tercatat 3.677.894 jiwa, bila dibandingkan pada tahun 2018 tercatat 3.570.272 jiwa, selama kurun waktu 3 tahun telah terjadi pertambahan penduduk sebesar 107.622 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini bukan saja disebabkan oleh angka kelahiran, tetapi lebih disebabkan karena migrasi penduduk dari luar Provinsi Jambi yang menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan konsumsi di Provinsi Jambi.

Tabel. 12.(T-B 3.6) : Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Produksi komoditas utama perkebunan belum optimal	- Rendahnya produktivitas komoditas utama perkebunan	- Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya tanaman yang baik dan benar (<i>Good Agriculture Practices/GAP</i>) secara konsisten - Infrastruktur yang belum memadai - Terjadinya anomali iklim (perubahan iklim global)
		- Tingginya perubahan komoditas non kelapa sawit menjadi kelapa sawit	- Stabilitas harga komoditi di tingkat pasar. - Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam (diversifikasi)
		- Kapasitas Kompetensi SDM yang masih rendah	- Kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur belum memadai - Kapasitas SDM petani masih rendah - Belum optimalnya pendampingan petani - Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha yang belum menjangkau seluruh wilayah
2	Masih rendahnya mutu produk komoditas utama perkebunan	- Penanganan pasca panen yang belum optimal (<i>Good Handling Practices/GHP</i>)	- Masih kurangnya sarana pendukung pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen - Masih kurangnya SDM pasca panen dalam peningkatan mutu produk
3	Belum optimalnya kinerja perkebunan dalam menyumbang penerimaan daerah	- Belum optimalnya pendataan pelaku usaha perkebunan	- Masih banyaknya kepemilikan usaha perkebunan yang belum terdaftar dan/atau tanpa izin - Masih banyaknya pelaku usaha perkebunan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak - Masih minimnya informasi perpetaan kawasan perkebunan dari pelaku usaha perkebunan
		- Belum optimalnya keberterimaan produk perkebunan di luar negeri	- Masih kurangnya penerapan teknologi pengolahan yang baik dan benar (<i>Good Manufacturing Practices/GMP</i>) - Masih belum semuanya memiliki sertifikat berlanjutan/ kelestarian (<i>sustainability</i>)

Tabel 13 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian					
1. Gambaran Pelayanan OPD	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan data dan informasi perkebunan belum optimal- Pemberdayaan terhadap masyarakat/petani belum maksimal- Secara umum rasio pencapaian kinerja pelayanan sudah memenuhi setiap target yang diinginkan, bahkan terdapat beberapa yang melebihi. Namun terdapat beberapa sasaran yang tidak konsisten dilaksanakan setiap tahunnya.	<ul style="list-style-type: none">- Fungisonalisasi Website.- Buku Statistik Perkebunan- SOP metode Pemberdayaan- Realisasi Renstra Dinas 2016-2020 terhadap target renstra (rasio capaian)	<ul style="list-style-type: none">- SDM Aparatur- Akses terhadap data dan informasi- Prasarana dan sarana Teknologi Informasi Keterbatasan jumlah tenaga teknis	<ul style="list-style-type: none">- Sinergitas antar sektor/ stakeholders- Ketersediaan data dan informasi dari instansi terkait- Masih rendahnya minat investor untuk menanamkan investasi di Provinsi Jambi- Belum terjadinya akses jual/pemasaran dari produk olahan keluar dari Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas aparatur terbatas- SDM aparatur bidang teknis tertentu masih kurang- Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir terbatas- Metode pemberdayaan belum diterapkan secara baik- Lemahnya koordinasi lintas sektor antara provinsi dengan Kab/Kota
2. Kajian terhadap Renstra SKPD	Luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman perkebunan	Angka Tetap (ATAP) dan Angka Sementara (ASEM) BPS	<ul style="list-style-type: none">- SDM aparatur- Prasarana dan sarana- Tingkat penerapan teknologi	<ul style="list-style-type: none">- Sosial budaya masyarakat- Sumberdaya manusia petani- Kondisi geografi	<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas SDM pertanian belum mantap- Rendahnya tingkat penerapan teknologi- Koordinasi antar pelaku usaha dan stakeholder masih rendah- Sebagian besar wilayah rawan bencana alam

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Produksi komoditas Kelapa sawit, Karet dan Kopi, Pinang dalam 5 (lima) tahun terakhir fluktuatif cenderung naik, sedangkan komoditas kelapa menurun.	Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2015-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Peranan UPT - Sinergitas Tupoksi - SDM aparatur - Prasarana dan sarana - Pemasyarakatan teknologi - Peranan UPT 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya Manusia Petani - Kondisi Geografi dan Demografi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan teknologi belum optimal - Tingginya pertumbuhan penduduk - Sebagian besar wilayah rawan Bencana Alam - Sosial budaya Masyarakat - Perubahan iklim (anomali) - Kemampuan aparatur dalam akses data dan informasi kurang - Kapasitas SDM belum memadai - Kemampuan aparatur dalam akses data dan informasi kurang
3. Kajian terhadap Renstra K/L	Dukungan terhadap upaya mencapai 6 (enam) sasaran Kementerian Pertanian di Provinsi belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi komoditi Perkebunan - Pengembangan komoditi perkebunan alternatif 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM Aparatur - Dukungan sarana dan prasarana yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi lahan tidak mendukung. - Alih Fungsi lahan - SDM Petani - Sinergitas antar sektor dan stake holder terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM pertanian belum mantap - Lambannya peningkatan produktivitas - Penerapan teknologi - Tingginya pertumbuhan penduduk - Sebagian besar wilayah rawan bencana alam - Tingginya alih fungsi lahan - Sosial budaya masyarakat - Anomali iklim - Kemampuan aparatur dalam akses data dan informasi kurang. - Satuan biaya untuk pengembangan produksi perkebunan tidak memadai

4. Kajian Terhadap RTRW	Berdasarkan RTRW Provinsi Jambi yang sudah disyahkan, indikasi arahan peraturan pemanfaatan kawasan perkebunan seluas 1.936.645 ha, terdiri dari Perkebunan Besar seluas 526.214 ha dan Perkebunan Rakyat seluas 1.410.431 ha.	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perkebunan. - RTRW Provinsi Jambi 	Tidak tersedianya data yang akurat dan valid tentang lahan perkebunan existing dan cadangan lahan perkebunan Berkelanjutan	Pengesahan peruntukan Lahan oleh Kemterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	- Belum samanya persepsi tentang status penggunaan lahan antara Kementerian terkait dengan Pemprov Jambi.
5. Kajian Terhadap KLHS	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pembangunan saat ini harus mengacu kepada Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan dan terjaminnya kelestarian Lingkungan Hidup. - Dalam pelaksanaan usaha tanaman perkebunan saat ini masih banyak yang menggunakan pupuk anorganik. - Pembangunan sawit Berkelanjutan terus diupayakan melalui Sertifikasi ISPO bagi pelaku usaha perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMN - RPJMD - Renstra Kementerian - Sustainable Development Goals (SDGs) - Permentan.38 tahun 2020 tentang Sertifikasi ISPO 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM aparatur - Prasarana dan sarana terutama laboratorium - Pemasyarakatan pedoman dan standarisasi - Peranan UPT - Sinergitas tupoksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas antar sektor/stakeholders - Ketersediaan data dan informasi dari Instansi terkakit 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman aparatur dalam hal pembangunan berkelanjutan, keamanan pangan, dll - Masih terbatasnya upaya sosialisasi kepada masyarakat. - Belum mantapnya koordinasi lintas instansi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan sumberdaya alam yang tersedia dan sumberdaya manusia yang berkualitas didukung oleh sistem informasi yang handal. Upaya pemantapan nilai-nilai budaya kearifan lokal sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Jambi; penyelenggaraan pembangunan; pelestarian lingkungan; asimilasi kultural; menjaga dan memelihara heterogenitas.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, yaitu :

VISI :“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT“

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

Jambi yang MAJU: Suatu Kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi yang AMAN : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakkan Supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya

bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi yang NYAMAN : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek Sosial Budaya, Ekonomi, Lingkungan hidup dan Tata Ruang Wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antar Pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi yang TERTIB : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi yang AMANAH : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang Religius dan menganyomi seluruh masyarakat yang flural.

Jambi yang PROFESIONAL : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Transfaran, dan Akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mewujudkan pecapaian visi yang telah ditetapkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

Yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi;

2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.

Yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan;

3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif;

Dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terlihat bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur telah menetapkan pembangunan perkebunan sebagai salah satu bidang yang menjadi perhatian sebagaimana tercantum pada misi ke-2, yaitu **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah “**, melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan.

3.2.3. Program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih 2020-2024 terdiri dari 5 (lima) pilar, yakni Jambi Cerdas dan Pintar, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamis, dan Jambi Responsif. Salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam rangka mewujudkan Jambi Mantap adalah Dumisake (Dua miliar satu kecamatan), dimana Dumisake ini akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan sebagian lainnya yang bukan kewenangan akan dilakukan melalui mekanisme bantuan kepada Kecamatan melalui Kabupaten/Kota dan langsung ke Desa/Kelurahan.

Selain itu juga berkaitan dengan program prioritas Jangka Pendek dan Jangka Menengah dalam upaya menanggulangi Pandemi Covid-19 dan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Pandemi Covid-19, selain membutuhkan disiplin seluruh masyarakat untuk menerapkan Prokes secara ketat dan benar, tentu diperlukan dorongan Pemerintah Daerah guna mempercepat penanganannya dan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan, meningkatkan industri pengolahan dan kualitas lingkungan hidup.

Beberapa hal yang menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, baik program Dumisake maupun program PEN yang kebijakannya akan dilaksanakan pada arah dan program dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sampai dengan kegiatan diakomodir didalam Renstra Perangkat Daerah, yang terkait langsung dan tidak langsung dengan pembangunan perkebunan adalah :

1. Memantapkan Pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan, melalui Peremajaan Sawit rakyat, Karet rakyat, Kelapa Dalam rakyat ; Bantuan benih / bibit tanaman perkebunan; Pengadaan alat mesin pertanian; Pengembangan komoditas unggulan daerah; Pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk; Peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna serta Revitalisasi perkebunan.
2. Meningkatnya industri pengolahan, melalui fasilitasi penggunaan karet sebagai bahan baku aspal; fasilitasi percepatan pengembangan industri hilir CPO, karet dan kelapa dalam.

3.2.4 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah.

Permasalahan pelayanan perangkat daerah terkait pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2021-2024, meliputi internal dan eksternal yang dapat diuraikan pada tabel.14 dibawah ini ;

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT

Tabel. 1 4 . Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Memantapkan Perekonomian masyarakat dan daerah (MISI.2)			
	Program 1.1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.2. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 1.3. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 1.4. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1.5. Penyuluhan Pertanian 1.6. Perizinan Usaha Pertanian	1. Kapasitas aparatur dinas belum optimal. 2. Terbatasnya Infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan. 3. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal. 4. Belum optimal Cakupan wilayah pembinaan dan pengawasan serta Pengendalian. 5. Sinergisitas tupoksi antar bidang dan UPTD belum terjalin dengan baik. 6. Masih rendahnya SDM pertanian \pm 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah.	1. Belum tersedianya data akurat terkait Pemetaan Infrastruktur dan Sarana prasarana serta Tingkat Produksi dan Pengembangan Komoditi Perkebunan; 2. Masih terbatasnya pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan mutu benih, serta Peredaran benih dan pupuk di lokasi kebun masyarakat; 3. Belum optimalnya penanganan Pasca panen, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perkebunan; 4. Belum terjangkaunya pelayanan Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) Perkebunan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) serta Kebakaran lahan perkebunan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.	1. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk tanaman perkebunan; 2. Adanya Kebijakan Nasional tentang program Grasida, Gratieks, Food Estate, Mitigasi, dan antisipasi perubahan iklim; 3. Adanya potensi Kearifan lokal terkait komoditi unggulan daerah Jambi (Kelapa sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi, Pinang, Kakao, Kayu Manis dan Tembakau) serta Lahan yang Potensial; 4. Tersedianya Teknologi pengolahan dan Sarana pendukung serta industri pengolahan hasil perkebunan;

Dalam upaya pencapaian visi misi kepala daerah dalam hal ini gubernur, Dinas Perkebunan mempunyai peran dalam mewujudkan pembangunan perkebunan dalam pencapaian masyarakat Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional. Sinergi dengan visi misi tersebut Dinas Perkebunan bertanggungjawab terhadap pembangunan perkebunan.

Untuk mencapai misi tersebut di atas tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Untuk menciptakan tatakelola yang handal tersebut perlu melakukan terobosan melalui kinerja yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi akuntabel untuk mewujudkan pembangunan perkebunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu perlu komitmen dan kompetensi SDM bidang perkebunan melalui peningkatan kualitas.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Pelaksanaan pembangunan pertanian periode tahun 2020-2024 merupakan tahap ke-5 dari pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025. Oleh karena itu diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan pembangunan periode sebelumnya dan menjawab isu-isu terkini, serta mengacu pada Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2015-2045. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2021- 2026 adalah :

- 1. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
- 2. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;
- 3. Peningkatan pendapatan keluarga petani;
- 4. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas di bidang pertanian (sub sektor Perkebunan) terdiri dari dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

(1). Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah :

- a. Meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif;

- b. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan
- c. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa, pinang dan Kulit Kayu Manis.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan perkebunan yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil perkebunan. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi :

- a. Revitalisasi perkebunan rakyat.
- b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,
- c. Pengembangan agroindustri perdesaan.
- d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran.
- e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar.
- f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

(2) Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda ke 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu *"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Moderen untuk terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian;

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian;
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani;
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Renstra Kementerian Pertanian RI akan dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2022-2026 yang akan datang. Mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian, target kinerja dari Kementerian Pertanian selama 2020- 2024 adalah *Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor*.

Selanjutnya, pada aspek peningkatan peran dan fungsi kelembagaan diarahkan untuk :

- (i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM;
- (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat;
- (iii) meningkatkan kerjasama internasional;
- (iv) meningkatkan kualitas perencanaan,

evaluasi, data dan informasi; (v) meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Memperhatikan peran strategis dan multidimensi pertanian serta tantangan besar ke depan, maka paradigma “Pembangunan berbasis pertanian (*agricultural led development*) “ sudah tidak relevan lagi, perlu direorientasi dengan paradigma baru. Paradigma baru tersebut pertama adalah Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) bahwa rencana pembangunan perekonomian nasional disusun dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanianb secara rasional.

Sektor pertanian dijadikan sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh. Paradigma yang kedua adalah Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan sebagai transformasi dari orientasi pembangunan berbasis bahan baku fosil menjadi berbasis sumberdaya terbarukan (sumberdaya hayati). Paradigma ini menuntut peran pertanian tidak hanya penghasil utama bahan pangan, tetapi menjadi penghasil biomassa bahan baku biorefinery untuk menghasilkan bahan pangan, pakan, pupuk, serat, energy, produk farmasi, kimiawi dan bioproduk lainnya.

Berdasarkan kondisi yang ada selama ini dan menyadari akan tantangan dimasa depan, maka Visi Pembangunan Pertanian Indonesia 2015 – 2045 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika“

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dalam priode 2015 – 2045, maka pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan 10 sasaran, dimana 2 (dua) di antaranya yang sangat terkait dengan sektor perkebunan adalah :

1. Meningkatnya pendapatan dan taraf hidup penduduk perdesaan sehingga seluruh penduduk desa terbebas dari kemiskinan paling lambat pada tahun 2030.
2. Terwujudnya kemandirian pangan nasional paling lambat pada 2020, kedaulatan pangan nasional, tercapainya pola makan sehat dan beragam paling lambat pada tahun 2025 dan kedaulatan pangan komunitas paling lambat tahun 2045.

Pembangunan sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan dilaksanakan dengan **Paradigma Biokultura**, yaitu kesadaran, semangat, nilai budaya, dan tindakan memanfaatkan sumberdaya

hayati bagi kesejahteraan manusia dalam ekosistem yang harmonis. Strategi utama yang dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan system Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan adalah :

1. Pengembangan sumberdaya insan yang kompeten dan berkarakter pertanian;
2. Optimalisasi sumberdaya alam;
3. Sistem inovasi ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi;
4. Infrastruktur pertanian, akses pembiayaan dan akses pasar;
5. Sistem usahatani agroindustri dan *agroservices* terpadu;
6. Klaster rantai nilai bioindustry;
7. Lingkungan pemberdaya bio-bisnis;

Salah satu kebijakan yang akan diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan strategi diatas adalah dengan menerapkan “Kebijakan ketahanan pangan, air dan energi“. Sejalan dengan itu, juga telah disusun Tahapan Periodik Pembangunan Pertanian, dimana priode 2015 – 2019 merupakan periode “Kokohnya fondasi sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan“ menuju tercapainya keunggulan daya saing pertanian terpadu berbasis sumberdaya alam berkelanjutan, sumberdaya insani berkualitas dan berkemampuan IPTEK bioindustri untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Disamping itu juga telah ditetapkan “Peta jalan (*roadmap*)“ pengembangan sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan, di mana priode 2015 – 2019 merupakan tahap dimana indikator sosok usahataniya adalah usahatani dengan sistem pertanian terpadu, indikator sosok petaninya adalah petani pelaku aktivitas *on-farm* serta status ketahanan- kedaulatan pangannya adalah kemandirian pangan nasional menuju kedaulatan pangan nasional dengan sistem pertanian terpadu sudah terbangun.

SIPP ini akan dijadikan bahan rujukan dasar dan akan disejalkan dengan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam rangka ,menciptakan dan mewujudkan pembangunan perkebunan terpadu yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Selanjutnya sub sektor perkebunan memiliki kerangka strategis dalam pembangunan perkebunan nasional yaitu 1) Pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan meningkat, 2) Ekspor produk perkebunan meningkat, melalui program Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks) dan Gerakan peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah dan daya saing (Grasida).

Untuk mendukung kerangka strategis tersebut perlu dicapai peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan yaitu melalui program dan kegiatan sektor perkebunan secara nasional yaitu :

1. Benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan;
2. Efisiensi Budidaya tanaman perkebunan;
3. Perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal;
4. Peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan.

Output yang ingin dicapai pada Program benih tanaman perkebunan yang berkualitas dan berkelanjutan, yaitu antara lain :

1. Tersedianya Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
2. Tersedianya Nusery
3. Terlaksanya Pengujian Mutu Benih
4. Terlaksananya Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan

Output yang ingin dicapai pada Program Efisiensi budidaya tanaman perkebunan yaitu antara lain :

1. Terbentuknya Kawasan kopi, Kakao, Kelapa, Karet, Sagu, Jambu Mete, Lada, Pala, Cengkeh, Tebu.
2. Terlaksananya Bimbingan teknis dan Koordinasi.

Sedangkan Output yang ingin dicapai pada Program Perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal adalah sebagai berikut :

1. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
2. Desa Organik Perkebunan
3. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan dan DPI

Program Peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan memiliki target output yaitu :

1. Tersalurnya Sarana dan Prasarana Pascapanen dan pengolahan Hasil
2. Tersedianya Standarisasi Hasil Perkebunan
3. Terlaksananya Promosi Produk Perkebunan

Pencapaian kerangka strategis dalam pembangunan perkebunan nasional tersebut dilaksanakan di Kawasan Perkebun dalam rangka mendukung Major Project Korporasi Perkebun.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pembangunan perkebunan tidak bisa terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis suatu wilayah saat ini dan di masa mendatang. Dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), salah satu isu utama pembangunan berkelanjutan tersebut adalah rendahnya ketahanan pangan dan keragaman genetik benih. Kerusakan ekosistem pada lahan perkebunan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain model pengelolaan lahan perkebunan yang tidak berkelanjutan yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan produksi. Hal ini berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan.

Dalam menyusun Rencana strategis (Renstra) tahun 2021–2026 harus mengacu kepada master plan Perkebunan Provinsi Jambi sebagai Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian sesuai dengan Permentan No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Penyusunan rencana pengembangan kawasan sentra produksi, merupakan upaya untuk mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penetapan kawasan sentra produksi ini guna pengembangan komoditas utama/unggulan sektor perkebunan.

Komoditas unggulan tanaman perkebunan Provinsi Jambi ditentukan dengan mempertimbangkan faktor tingkat kesesuaian lahan, pemusatan komoditas, tingkat pertumbuhan luas tanam dan tingkat pertumbuhan produksi perkebunan. Dari kajian masterplan perkebunan, komoditas perkebunan yang layak ditetapkan sebagai komoditas unggulan adalah : kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, pinang, dan Kulit Kayu Manis. Daerah Provinsi Jambi juga merupakan salah satu Provinsi dengan areal perkebunan yang terluas di Indonesia, dimana saat ini terdapat sekitar 1,9 juta hektar lebih luas perkebunan di Provinsi Jambi dengan berbagai komoditas perkebunan. Luas areal perkebunan ini didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, karet, kulit kayu manis, kelapa, kopi, dan pinang.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan masih diperlukan sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Dalam KLHS terdapat 6 aspek kajian, yaitu :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA);
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tanaman perkebunan terkait dengan 6 aspek tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan.
2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunnya nilai kompetitif
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam
5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola SDA
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat
7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung (alat/mechanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang akan diterapkan
8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim.

9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.

Ancaman krisis pangan saat ini dan ke depan di Indonesia dan bahkan di seluruh belahan bumi akan semakin serius, baik sebagai akibat semakin berkurangnya lahan pertanian, pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global sangat dirasakan saat ini, dimana kekeringan dan banjir setiap Tahun melanda wilayah Jambi dan Indonesia secara keseluruhan. Sejak Tahun 2010 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celcius dan ada kecendrungan peningkatan setiap tahunnya. Bagi sektor pertanian dan perkebunan tentunya kondisi ini sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan produksi, bahkan dapat mengakibatkan gagal panen atau puso.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan dan kajian terhadap Renstra K/L, RTRW dan KLHS ditentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Perkebunan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

❖ Kekuatan (*strenghts*) :

1. Tersedianya Sistem sarana dan prasarana (bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, PSPP, PSPHP, UPTD-BPTP, UPTD-BPSBTP, UPTD-BPPBTP);
2. Tersedianya Sumber daya Manusia (Penyuluh, PPNS, PBT, Pengawas Pestsida, Petugas PUP, Brigade Karhutlah, tenaga teknis Pemetaan, tenaga Perencana, Fasda);
3. Tersedianya Laboratorium benih, OPT, dan APH, serta Lahan kebun dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
4. Tersedianya Regulasi tentang Perkebunan berupa Peraturan, Norma, Standar Operasional, dan Perda Provinsi Jambi No.19 tahun 2020 tentang Tata Niaga Perkebunan Provinsi Jambi;

❖ **Kelemahan (*weakness*) :**

1. Belum tersedianya data akurat terkait Pemetaan Infrastruktur dan Sarana prasarana serta Tingkat Produksi dan Pengembangan Komoditi Perkebunan;
2. Masih terbatasnya pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan mutu benih, serta Peredaran benih dan pupuk di lokasi kebun masyarakat;
3. Belum optimalnya penanganan Pasca panen, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perkebunan;
4. Belum terjangkaunya pelayanan Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) Perkebunan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) serta Kebakaran lahan perkebunan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

❖ **Peluang (*opportunities*):**

1. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk tanaman perkebunan;
2. Adanya Kebijakan Nasional tentang program Grasida, Gratieks, Food Estate, Mitigasi, dan antisipasi perubahan iklim;
3. Adanya potensi Kearifan lokal terkait komoditi unggulan daerah Jambi (Kelapa sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi, Pinang, Kakao, Kayu Manis dan Tembakau) serta Lahan yang Potensial;
4. Tersedianya Teknologi pengolahan dan Sarana pendukung serta industri pengolahan hasil perkebunan;

❖ **Tantangan (*threats*):**

1. Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan masih dibawah potensi teknis;
2. SDM pelaku usaha perkebunan dan Kelembagaan masih rendah;
3. Akses petani terhadap permodalan dan Sarana prasarana produksi serta pemasaran masih terbatas;
4. Isu lingkungan hidup (kesuburan tanah), globalisasi dan anomaly iklim serta penerapan teknologi masih terbatas.

Selain itu *untuk* mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, atau dikenal dengan REDD+, serta pertanian berkelanjutan dan tata ruang yang lebih baik, Dinas Perkebunan ikut berperan aktif dalam Program *BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF ISFL)*.

Program ini merupakan inisiatif pendanaan yang didukung negara-negara donor dan dikelola oleh World Bank. Program BioCF ISFL bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan lansekap secara berkelanjutan dan mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau yang dikenal dengan sektor AFOLU (*agriculture, forestry and land use*), serta meningkatkan sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat sehingga mengurangi tekanan terhadap hutan alam dan lahan gambut.

Untuk periode Jangka Menengah tahun 2022-2026, dinas Perkebunan Provinsi Jambi telah merumuskan kegiatan Hibah JSLMP Bio CF ISFL dimaksud kedalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) dinas Perkebunan Provinsi Jambi melalui 4 (empat) program utama, yakni; Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan program Penyuluhan Pertanian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan Provinsi Jambi yaitu : **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi akan mendukung terlaksananya ke tiga Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

➤ Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Jambi serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan daya saing subsektor perkebunan;
3. Meningkatkan kemampuan SDM – aparatur, petani dan kelembagaan.

➤ Sasaran

Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta pendapatan petani;
3. Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis;

Dalam rangka mewujudkan visi melalui misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 15 (T.IV.C.25) berikut :

Tabel 15. (T.IV.C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026
 (IKU DINAS PERKEBUNAN)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP OPD	60,08 (B)	65,00 (B)	67,00 (B)	69,00 (B)	71,00(BB)	73,00 (BB)
2.	Meningkatkan daya saing Subsektor Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Jumlah produksi Komoditas Unggulan Perkebunan						
			- Kelapa sawit (ton)	1.830.035	1.920.324	1.950.054	2.000.004	2.030.531	2.073.290
			- Kelapa (ton)	108.789	116.475	118.003	110.043	111.486	112.949
			- Karet (ton)	353.145	364.906	369.277	327.638	331.563	335.535
			- Kopi (ton)	16.379	16.511	17.573	25.346	26.976	28.710
			- Pinang (ton)	13.732	14.165	14.341	14.519	14.699	14.882
			- Coklat	826,00	867,30	908,60	949,9	991,20	1.032
			- Kulit Kayu Manis	57.072	53.422	53.679	53.937	54.196	54.452
			Produktivitas Tanaman Perkebunan						
			- Kelapa sawit (ton)	3,05	3,3	3,6	4,0	4,4	4,8
			- Kelapa (ton)	1,22	1,23	1,23	1,24	1,25	1,26
			- Karet (ton)	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,97
			- Kopi (ton)	0,85	1,23	1,32	1,42	1,53	1,65
			-Pinang (ton)	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94
			- Coklat (ton)	0,57	0,59	0,63	0,65	0,68	0,71
			-Kulit Kayu Manis (ton)	2,17	2,04	1,98	1,96	1,94	192
			Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	4,22	4,80	4,82	5,04	5,28	5,49
		Meningkatnya pendapatan petani	NTP Sub sektor Perkebunan	117,83	120,69	122,76	125,04	127,25	127,53

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan indikator kinerja sasaran dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

I. Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik

Terwujudnya peningkatan Nilai SAKIP OPD

- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Formulasi Perhitungan : Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD

II. Meningkatkan pendapatan petani tanaman perkebunan

Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan

- Jumlah produksi komoditas unggulan tanaman perkebunan.

Formulasi Perhitungan : jumlah produksi komoditas unggulan tanaman perkebunan tahun berkenaan.

Untuk menghitung pendapatan petani dilakukan dengan menghitung :

1. NTP sub sektor Perkebunan

Formulasi perhitungan : Data BPS

2. Tingkat pendapatan petani komoditas unggulan tanaman perkebunan (Rp/th)

Formulasi perhitungan : Rata-rata harga komoditi tanaman perkebunan tahun berkenaan dikali jumlah produksi dibagi 12 (dua belas) bulan.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 , maka Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mendukung ke-3 Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT

MISI 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan : Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

MISI 2 : Memantapkan Perekonomian masyarakat dan daerah

Tujuan : Meningkatkan daya saing subsektor perkebunan

Sasaran : Meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dan meningkatnya pendapatan petani.

MISI 3 : Memantapkan Kualitas SDM

Tujuan : Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani dan kelembagaan.

Sasaran : Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan.

5.1 STRATEGI

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam menentukan strategi dilakukan dengan evaluasi faktor-faktor lingkungan strategi yang mempengaruhi dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weakness*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*). Berdasarkan analisis SWOT dan pembobotan faktor-faktor internal dan eksternal maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD (bersih, transparan, dan akuntabel)

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

2. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun;

Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun.

3. Memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;

Pemenuhan penyediaan bahan baku bioenergi dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio- industri dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya.

4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan.

5.2 Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan perkebunan serta kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi, maka dirumuskan arah kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2021-2026 adalah :

1. Kebijakan Umum

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.
- b. Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan
- c. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
- d. Mewujudkan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
- e. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan
- f. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan
- g. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
- h. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan ditataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing

- i. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan
- j. Meningkatkan kompetensi kualitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan petani serta pelaku usaha dalam kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian serta memperkuat pemberdayaan kelembagaan baik ekonomi maupun sosial.

2. Kebijakan Teknis

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel dan profesional.
- b. Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan dimaksudkan untuk memfokuskan pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dalam perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap sumber penerimaan negara seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, pinang kakao, dan kulit kayu manis. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan tersebut dipilih pada lahan-lahan eksisting dan bukaan baru yang sesuai dengan potensi, kebutuhan dan kesiapan daerah. Fokus pengembangan komoditas unggulan perkebunan yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dipersyaratkan layak secara ekonomi, layak bio-fisik(agro-ecosystem), layak sosial, layak pasar dan layak pengembangan atau memiliki potensi keberlanjutan. Pengembangan komoditas tersebut diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas.
- c. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan teknologi melalui adopsi teknologi kepada petani dengan penyediaan alat dan mesin pertanian, melakukan surveylance dan pengujian hama dan penyakit tanaman perkebunan, pemantauan, pengawasan dan pengujian pupuk dan pestisida, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, pengembangan dan pengujian mutu benih, intensifikasi, pengadaan

sarana dan prasarana teknologi pertanian, pengelolaan lahan dan air melalui normalisasi saluran drainase serta pembangunan dan rehabilitasi jalan produksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi teknologi pada tingkat petani agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih optimal, meningkatkan nilai tambah, atau lebih efisien dalam melakukan usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman.

- d. Meningkatkan nilai tambah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil tanaman perkebunan dengan memfasilitasi unit pengolahan produk, mendorong terwujudnya klaster industri hilir, meningkatkan intensitas promosi produk perkebunan, memperkuat jaringan pemasaran hasil olahan , meningkatkan mutu hasil produk melalui pembinaan pengolahan mutu produk petani dan pelaku usaha agribisnis serta meningkatkan akses kemitraan pemasaran dan pengembangan informasi pasar.
- e. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan penyuluhan yang maju dan berkelanjutan; mendorong dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha (stakeholder) serta lembaga swadaya masyarakat, guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Usaha yang akan ditempuh meliputi :
 - Meningkatkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian petani serta petugas/aparatur melalui pelatihan.
 - Memperkuat pemberdayaan kelembagaan petani baik ekonomi (koperasi) maupun sosial (asosiasi)

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur sesuai yang tertuang dalam Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan perkebunan seperti Tabel.16 (T-C.26) berikut :

Tabel 16. (Tabel.T-C. 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT

Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD	1. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien
			2. Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
			3. Peningkatan pelayanan publik bidang Perkebunan secara akuntabel dan profesional
Misi 2: Memantapkan Perekonomian masyarakat dan daerah			
Meningkatkan daya saing subsektor Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun	1. Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan
			2. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
			3. Meningkatkan Nilai tambah yang berdaya saing dan Berkelanjutan dengan mengembangkan industri Hilir, pemasaran, dan Ekspor.
			4. Meningkatkan akses Kemitraan pemasaran dan pengembangan informasi pasar.
			5. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan Kawasan
			6. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang lebih baik.
			7. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan Lingkungan
			8. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di tataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing
			9.Mewujudkan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan dan penanganan gangguan usaha perkebunan.
			10.Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Misi 2 : Memantapkan Perekonomian masyarakat dan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			11.Mendorong sistem pertanian bio-industri berbasis pengembangan komoditas perkebunan.
			12.Mendorong peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan perkebunan serta Emisi Carbon.
	Meningkatnya Pendapatan petani	Peningkatan upaya pengembangan budidaya komoditas perkebunan.	1. Peningkatan luas tanam dan peremajaan tanaman perkebunan
			2. Peningkatan diversifikasi tanaman perkebunan/tanaman sela.
		Peningkatan produktivitas	1. Penyediaan Sarana pertanian
			2. Penyediaan Prasarana pertanian
		Peningkatan Kompetensi SDM	1. Penyediaan petugas lapangan yang Profesional.
			2. Peningkatan kualitas petani dan kelembagaan yang Mapan.
Misi 3 : Memantapkan Kualitas SDM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani. dan kelembagaan.	Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan.	Peningkatan kompetensi petugas / petani dan kelembagaan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian..	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia petani dan kualitas kelembagaan Sosial ekonomi petani serta pelaku usaha perkebunan.
			2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan penyuluhan dan Lembaga Swadaya masyarakat yang maju dan berkelanjutan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi maka tujuan utama program pembangunan tanaman perkebunan adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani tanaman perkebunan dan melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Perkebunan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perkebunan dan sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dalam pembangunan tanaman perkebunan di Provinsi Jambi serta memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Jambi, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan tanaman perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

a. Program Utama :

1. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian.

b. Program Pendukung :

Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi, maka ditetapkan program pendukung sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN (URUSAN)

1. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian

- Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ;
 - Pengawasan Sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian lainnya.
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian.
- Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman ;
 - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan.

- Pengelolaan Sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme Kewenangan Provinsi ;
- Pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme.

2. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian

- Petanaan Prasarana pertanian/perkebunan ;
- Perencanaan, pengembangan Prasarana, kawasan dan komoditi Perkebunan.
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Pembukaan, pengelolaan dan rehabilitasi lahan perkebunan berbasis lingkungan).
- Koordinasi dan Sikronisasi pelaksanaan pengelolaan Jalan Usaha Tani (JUT).
- Koordinasi dan Sikronisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi (TAM) di tingkat Usaha tani.
- Koordinasi dan Sikronisasi penataan Prasarana pendukung pertanian lainnya.
- Pembangunan dan pemeliharaan Laboratorium pertanian.
- Penyediaan peralatan Laboratorium pertanian.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi;
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan.
- Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan.
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun, Gangguan Usaha Tanaman (GUP) pangan, hortikultura, dan Perkebunan.

4. Program Perizinan Usaha Pertanian

- Penerbitan Izin Usaha Pertanian (IUP) yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- Penyusunan Standar Pelayanan Publik pemberian IUP.
- Penilaian Kelayakan dan Pemberian pertimbangan teknis IUP di Lintas Kabupaten/Kota.
- Pembinaan dan pengawasan Penerapan IUP.

5. Program Penyuluhan Pertanian

- Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian;

- Kerjasama pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.
- Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian;
 - Diseminasi informasi teknis, social ekonomi dan inovasi pertanian.
 - Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian.
 - Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Perkebunan
 - Bimbingan teknis Pasca Panen.
 - Rintisan Sertifikasi ISPO Swadaya (BiO-CF).
- Pengembangan kapasitas Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan;
 - Pembentukan dan penguatan kelembagaan Korporasi petani.
 - Dukungan teknis penanganan Pasca Panen rakyat.
 - Bimbingan teknis Pasca panen Kopi dan Karet.
 - Rintisan Model Pengembangan desa Mandiri Benih.
 - Pertemuan kerjasama Perdagangan Petani dengan pengusaha (Pabrikan) (Program BiO-CF).
 - Identifikasi dan penguatan Hulu-Hilir Kelembagaan petani perkebunan.

6.2 PROGRAM DAN KEGIATAN (NON URUSAN)

Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi, maka ditetapkan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikasi Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja dan Pendanaan Periode tahun 2021- 2026 ditampilkan pada Tabel 17 sebagai berikut :

Tabel.17. Indikator Kinerja Program Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOTOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)						Kondisi Akhir th 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai SAKIP	65,00 (B)	67,00 (B)	69,00 (B)	71,00 (BB)	73,00 (BB)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
2.	Meningkatkan daya saing subsektor Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	4,22	4,80	4,82	5,04	5,28	5,49	5,49
			Persentase Luas Areal Pengendalian OPT Perkebunan	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	23,0
3	Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani. dan kelembagaan	Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan	Persentase ketersediaan SDM dan Kelembagaan Petani yang mapan	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerja dengan Formulasi sebagai berikut :

I. NON URUSAN

- a. Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
 - Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
Formulasi perhitungan : jumlah pelayanan administrasi yang terlaksana dibagi dengan jumlah seluruh pelayanan administrasi di kali seratus
- b. Tercukupinya sarana dan prasarana kerja aparatur
 - Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Formulasi perhitungan: jumlah kegiatan sarana prasarana tahun berkenaan dibagi dengan jumlah kegiatan sarana dan prasarana kerja aparatur dikali seratus
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas dan disiplin aparatur
 - Persentase tingkat kehadiran ASN
Formulasi perhitungan : Jumlah kehadiran pegawai tahun berkenaan dibagi dengan jumlah seluruh pegawai di kali seratus.

II. URUSAN

1. Terwujudnya peningkatan produksi Perkebunan Produksi Komoditas Utama tanaman perkebunan
Formulasi perhitungan : Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan (data statistik tanaman perkebunan)

Produktivitas Komoditas Utama perkebunan,

Formulasi perhitungan : Jumlah produksi komoditas tanaman perkebunan tahun berkenaan (kg) dibagi dengan luas lahan produktif (TM) di kali seratus

2. Terwujudnya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian/perkebunan Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya

Formulasi perhitungan : Jumlah SDM petani dan apartur yang ditingkatkan kompetensinya di bagi dengan jumlah petani / kelompok tani yang terdaftar dalam Simluhtan dikali seratus.

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan tanaman perkebunan di Provinsi Jambi adalah sumberdaya alam,sumber daya manusia, dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Jambi sangat mendukung

terhadap pengembangan pembangunan tanaman Perkebunan. Akan tetapi potensi tersebut akan memberikan dampak yang optimal apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik. Untuk itu sangat diperlukan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku pembangunan tanaman perkebunan. Pendanaan untuk mencapai sasaran tersebut berasal dari APBD Provinsi Jambi, dengan alokasi dana indikatif untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung selama periode 2021 - 2026 disajikan pada Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagaimana disajikan pada Tabel 18. (Tabel T-C.27. Permendagri No. 86 Tahun 2017) sebagai berikut :

TABEL.18. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)
3	27				NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				21.576.919.647		21.640.147.130		22.780.803.861		23.995.448.273		25.441.725.210		133.422.104.342
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai SAKIP	65,00 (B)	67,00 (B)	20.044.539.935	69,00 (B)	22.194.367.669	71,00 (BB)	22.350.725.428	73,00 (BB)	23.560.855.918	75,00 (BB)	24.852.393.237	75,00 (BB)	112.022.882.187
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	9 Dokumen	9 Dokumen	416.689.473	9 Dokumen	499.395.447	9 Dokumen	600.004.594	9 Dokumen	722.599.042	9 Dokumen	872.223.518	45 Dokumen	3.110.912.074
				01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	224.357.500	6 Dokumen	280.446.875	6 Dokumen	350.558.594	6 Dokumen	438.198.242	6 Dokumen	547.747.803	36 Dokumen	1.841.309.014
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	17.250.000	1 Dokumen	19.837.500	1 Dokumen	22.813.125	1 Dokumen	26.235.094	1 Dokumen	101.135.719
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	23.000.000	1 Dokumen	26.450.000	1 Dokumen	30.417.500	1 Dokumen	34.980.125	1 Dokumen	134.847.625
				04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	17.250.000	1 Dokumen	19.837.500	1 Dokumen	22.813.125	1 Dokumen	26.235.094	1 Dokumen	101.135.719
				05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	17.250.000	1 Dokumen	19.837.500	1 Dokumen	22.813.125	1 Dokumen	26.235.094	1 Dokumen	101.135.719
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD, dan Laporan Hasil Koordinasi LCKI	5 Laporan	5 Laporan	150.000.000	5 Laporan	172.500.000	5 Laporan	198.375.000	5 Laporan	228.131.250	5 Laporan	262.350.938	25 Laporan	1.011.357.188
				07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	3 Laporan	3 Laporan	22.331.973	3 Laporan	23.448.572	3 Laporan	24.621.000	3 Laporan	25.852.050	3 Laporan	27.144.653	15 Laporan	123.398.248

3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan	5 Laporan	5 Laporan	16.507.639.281	5 Laporan	17.333.021.245	5 Laporan	18.199.672.307	5 Laporan	19.109.655.923	5 Laporan	20.065.138.719	5 Laporan	
			01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji/Tunjangan	108 Org/14bln	108 Org/14bln	16.117.639.281	108 Org/14bln	16.923.521.245	108 Org/14bln	17.769.697.307	108 Org/14bln	18.658.182.173	108 Org/14bln			
			02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	280.000.000	2 Dokumen	294.000.000	2 Dokumen	308.700.000						
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	110.000.000	3 Dokumen	115.500								
3	27	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1										
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1											
			04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pem													
				Pe														

3	27	01	1.04		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian	3 Laporan	3 Laporan	624.450.000	3 Laporan	655.672.500	3 Laporan	688.456.125	3 Laporan	722.878.931	3 Laporan	759.022.878	3 Laporan	3.450.480.434
				02	Pengadaan Pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	165 Stel	165 steel	98.000.000	165 steel	102.900.000	165 steel	108.045.000	165 steel	113.447.250	165 steel	119.119.613	165 steel	541.511.863
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000.000	1 Dokumen	3.780.000.000	1 Dokumen	3.969.000.000	1 Dokumen	4.167.450.000	1 Dokumen	4.375.822.500	1 Dokumen	19.892.272.500
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang ikut Diklat berdasarkan Tupoksi	20 Orang	20 Orang	526.450.000	120 Orang	552.772.500	120 Orang	580.411.125	120 Orang	609.431.681	120 Orang	639.903.265	120 Orang	2.908.968.572
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor	5 Laporan	7 Laporan	871.423.350	7 Laporan	914.994.518	7 Laporan	960.744.243	7 Laporan	1.008.781.456	7 Laporan	1.059.220.528	7 Laporan	4.815.164.095
				01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	6 Paket	26.100.000	6 Paket	27.405.000	6 Paket	28.775.250	6 Paket	30.214.013	6 Paket	31.724.713	6 Paket	144.218.976
				02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	48 Paket	48 Paket	219.253.750	48 Paket	230.216.438	48 Paket	241.727.259	48 Paket	253.813.622	48 Paket	266.504.303	48 Paket	1.211.515.373
				03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga.	24 Paket	24 Paket	83.033.200	24 Paket	87.184.860	24 Paket	91.544.103	24 Paket	96.121.308	24 Paket	100.927.374	24 Paket	458.810.845
				06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	2 Paket	21.120.000	2 Paket	22.176.000	2 Paket	23.284.800	2 Paket	24.449.040	2 Paket	25.671.492	2 Paket	116.701.332
				09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	521.916.400	12 Laporan	548.012.220	12 Laporan	575.412.831	12 Laporan	604.183.473	12 Laporan	634.392.646	12 Laporan	2.883.917.570

3	27	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Jenis		432.637.581	5 Jenis	1.421.667.960	3 Jenis	463.751.358	3 Jenis	486.938.926	3 Jenis	511.285.872	3 Jenis	2.336.281.697
			01	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas (Roda 2) operasional/lapangan	unit	0	-	25 Unit	980.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	6 Paket	6 Paket	180.607.581	6 Paket	189.637.960	6 Paket	199.119.858	6 Paket	209.075.851	6 Paket	219.529.644	6 Paket	997.970.894
			06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	8 Unit	20 Unit	252.030.000	20 Unit	252.030.000	20 Unit	264.631.500	20 Unit	277.863.075	20 Unit	291.756.229	20 Unit	1.338.310.804
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis		512.000.000	4 Jenis	509.940.000	4 Jenis	535.437.000	4 Jenis	562.208.850	4 Jenis	590.319.293	4 Jenis	2.709.905.143
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	42.000.000	1 Laporan	44.100.000	1 Laporan	46.305.000	1 Laporan	48.620.250	1 Laporan	51.051.263	1 Laporan	232.076.513
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	1 Laporan	470.000.000	1 Laporan	465.840.000	1 Laporan	489.132.000	1 Laporan	513.588.600	1 Laporan	539.268.030	1 Laporan	2.477.828.630
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	46 Unit	88 Unit	495.900.250	96 Unit	666.686.000	96 Unit	700.020.300	96 Unit	735.021.315	96 Unit	771.772.381	96 Unit	3.369.400.246
			01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	53 Unit	61 Unit	360.060.250	61 Unit	255.000.000	61 Unit	267.750.000	61 Unit	281.137.500	61 Unit	295.194.375	61 Unit	1.459.142.125
			06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 unit	27 unit	87.320.000	27 unit	91.686.000	27 unit	96.270.300	27 unit	101.083.815	27 unit	106.138.006	27 unit	482.498.121
			09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di Rehab	8 unit	8 unit	48.520.000	8 unit	320.000.000	8 unit	336.000.000	8 unit	352.800.000	8 unit	370.440.000	8 unit	1.427.760.000

					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				25.574.000.000		28.268.250.000		29.352.387.500		29.129.835.625		30.624.787.469		142.949.260.594
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan Kabupaten/ Kota.	14,0 Persen	14,5 Persen	16.604.000.000	15,0 Persen	17.478.250.000	15,5 Persen	18.403.387.500	16,0 Persen	19.183.248.125	16,5 Persen	20.071.653.719	16,5 Persen	91.740.539.344
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sebaran Peredaran Sarana Pertanian/Perkebunan	11 kab/kota	11 kab/kota	277.000.000	11 kab/kota	311.050.000	11 kab/kota	341.207.500	11 kab/kota	375.063.625	11 kab/kota	413.131.919	11 kab/kota	1.717.453.044
				01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian/Perkebunan	11 Laporan	11 Laporan	150.000.000	11 Laporan	165.000.000	11 Laporan	173.250.000	11 Laporan	181.912.500	11 Laporan	191.008.125	11 Laporan	861.170.625
				02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	2 dokumen	2 dokumen	127.000.000	2 dokumen	146.050.000	2 dokumen	167.957.500	2 dokumen	193.151.125	2 dokumen	222.123.794	2 dokumen	856.282.419
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Komoditi Unggulan Lokal bersertifikat	3 Komoditi	6 Komoditi	15.500.000.000	6 Komoditi	16.257.500.000	6 Komoditi	17.052.875.000	8 Komoditi	17.688.018.750	8 Komoditi	18.414.919.688	10 Komoditi	84.913.313.438
				01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	385 Sertifikat	425 Sertifikat	350.000.000	425 Sertifikat	350.000.000	425 Sertifikat	350.000.000	300 Sertifikat	150.000.000			1100 Sertifikat	1.200.000.000
				04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	11 Laporan	14 Laporan	15.150.000.000	14 Laporan	15.907.500.000	16 Laporan	16.702.875.000	16 Laporan	17.538.018.750	16 Laporan	18.414.919.688	16 Laporan	83.713.313.438

3	27	02	1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah SDG Tumbuhan, Mikro organisme yang dikelola	2 Kab/Kota	4 Kab/Kota	827.000.000	4 Kab/Kota	909.700.000	4 Kab/Kota	1.009.305.000	6 Kab/Kota	1.120.165.750	8 Kab/Kota	1.243.602.113	9 Kab/Kota	
3	27	02	1.03	02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikro organisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang dinilai	1 VUB	1 VUB	157.000.000	1 VUB	172.700.000	1 VUB	198.605.000	1 VUB	228.395.750	1 VUB		
3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	1 Laporan	4 Laporan	670.000.000	4 Laporan	737.000.000	5 Laporan	810.700.000	6 Laporan				
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan di Kab/Kota	8,0 Persen	8,5 Persen	2.395.000.000	9,0 Persen	2.530.000.000	9,5 Persen						
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang ditata	2 Kegiatan	4 Kegiatan	2.395.000.000	4 Kegiatan								
			01		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, kawasan dan komoditas Pertanian/perkebunan.	2 Dokumen	2 Dokumen										
			02		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.	Jumlah pengendalian, pemanfaatan prasarana kawasa dan komoditas (Pengadaan Keg.												
			02		Pengendalian Prasa													

				03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	115.000.000	2 Dokumen	115.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	157.500.000	12 Dokumen	637.500.000
				04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani.	2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	230.000.000	12 Dokumen	810.000.000
																			-
				07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah UPTD yang dilakukan pembangunan/pemeliharaan laboratorium	1 Unit	2 Unit	250.000.000	0	-	2 Unit	200.000.000	0	-	0	-	3 Unit	450.000.000
				09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	312.500.000	5 Laporan	1.212.500.000
				10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD pertanian serta Sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara, dan direhabilitasi.	0	0	-	0	-	1 unit	125.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	157.500.000	4 unit	432.500.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan pertanian	27,0 Persen	30,0 Persen	2.450.000.000	31,0 Persen	2.560.000.000	32,0 Persen	2.719.000.000	33,0 Persen	2.802.725.000	34,0 Persen	2.945.633.750	34,0 Persen	13.477.358.750
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Cakupan Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	9 Kab/Kota		2.450.000.000	9 Kab/Kota	2.560.000.000	9 Kab/Kota	2.719.000.000	9 Kab/Kota	2.802.725.000	9 Kab/Kota	2.945.633.750	9 Kab/Kota	13.477.358.750
				01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan (Demplot)	25 Ha	125 Ha	200.000.000	125 Ha	210.000.000	125 Ha	241.500.000	125 Ha	277.725.000	125 Ha	319.383.750	625 Ha	1.248.608.750

					02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani. (Keg,BiOCF)	0	100 Ha	1.450.000.000	100 Ha	1.500.000.000	150 Ha	1.550.000.000	150 Ha	1.550.000.000	200 Ha	1.600.000.000	950 Ha	7.650.000.000
					03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan (termasuk BiOCF).	100 Ha	100 Ha	500.000.000	100 Ha	500.000.000	100 Ha	525.000.000	100 Ha	525.000.000	100 Ha	551.250.000	500 Ha	2.601.250.000
					04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam bidang Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam bidang Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (termasuk BiOCF)	0	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	350.000.000	4 Laporan	402.500.000	4 Laporan	450.000.000	4 Laporan	475.000.000	4 Laporan	1.977.500.000
3	27	06				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelengkapan dokumen Perizinan Perkebunan	100	100	325.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	300.000.000	100	1.425.000.000
3	27	06	1.01			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Perkebunan Yang Memenuhi Standar Operasional/Ketentuan yang berlaku	18 PT	18 PT	325.000.000	18 PT	250.000.000	18 PT	275.000.000	18 PT	275.000.000	18 PT	300.000.000	18 PT	1.425.000.000
					01	Penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	Standar pelayanan Publik pemberian izin usaha pertanian	0	3 dokumen	100.000.000	0	-	2 dokumen	75.000.000	0	-	0	-	3 dokumen	175.000.000
					02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pertimbangan Teknis izin usaha pertanian di Lintas kabupaten/Kota	0	5 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	125.000.000	5 Dokumen	175.000.000	5 Dokumen	175.000.000	5 Dokumen	775.000.000
					03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan		75.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	125.000.000	3 Laporan	475.000.000

3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM dan Kelembagaan Pertanian Berkualitas di Kab/kota	4,5 Persen	5,0 Persen	3.800.000.000,00	5,5 Persen	5.450.000.000,00	6,0 Persen	5.250.000.000,00	6,5 Persen	4.038.862.500,00	7,0 Persen	4.350.000.000,00	7,0 Persen	22.888.862.500,00
3 27 07 1.01	Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	Jumlah tenaga Penyuluh PerkebunanTerampil	20 Orang	28 Orang	500.000.000	28 Orang	900.000.000	38 Orang	800.000.000	50 Orang	550.000.000	70 Orang	600.000.000	90 Orang	3.350.000.000
	01 Pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh pertanian yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat.	8 Orang	8 orang	250.000.000	8 orang	450.000.000	8 orang	400.000.000	10 orang	300.000.000	10 orang	300.000.000	10 orang	1.700.000.000
	02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	0	20 Orang	250.000.000	20 Orang	450.000.000	30 orang	400.000.000	40 Orang	250.000.000	60 Orang	300.000.000	80 Orang	1.650.000.000
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Wilayah Penerapan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	4 kab/kota	4 kab/kota	1.250.000.000,00	4 kab/kota	1.650.000.000,00	4 kab/kota	1.600.000.000,00	4 kab/kota	1.250.000.000,00	4 kab/kota	1.350.000.000,00	4 kab/kota	7.100 000.000,00
	01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	400.000.000	4 Dokumen	350.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000	16 Dokumen	1.650.000.000
	02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompoktani yang mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan.	2 Poktan	5 Poktan	950.000.000	5 Poktan	1.250.000.000	5 Poktan	1.250.000.000	5 Poktan	950.000.000	5 Poktan	1.050.000.000	25 Poktan	5.450.000.000
3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Mapan.	3 Poktan	6 Poktan	2.050.000.000	6 Poktan	2.900.000.000	8 Poktan	2.850.000.000	8 Poktan	2.238.862.500	8 Poktan	2.400.000.000	41 Poktan	12.438.862.500
	01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	3 unit	4 unit	1.500.000.000	6 Unit	2.150.000.000	6 Unit	2.150.000.000	6 unit	1.500.000.000	8 unit	1.650.000.000	32 unit	8.950.000.000
	02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.	Jumlah pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.	0	2 Laporan	550.000.000	3 Laporan	750.000.000	3 Laporan	700.000.000	3 Laporan	738.862.500	1 Laporan	750.000.000	12 Laporan	3.488.862.500
TOTAL PAGU					45.618.539.935		50.462.617.669		51.703.112.928		52.690.691.543		55.477.180.706		254.972.142.781

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Rencana Kinerja Penyelenggaraan Bidang

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD pada Tabel 19, berikut :

Tabel 19. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan

Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai SAKIP	60,08 (B)	65,00 (B)	67,00 (B)	69,00 (B)	71,00 (B)	73,00 (BB)	73,00 (BB)
Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	4,22	4,22	4,82	5,04	5,28	5,49	5,49
Persentase Luas Areal Pengendalian OPT Perkebunan	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	22,0
Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian/Perkebunan	8,0	8,0	9,0	9,0	10,0	11,0	11,0
Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian/Perkebunan	14,0	15,0	15,0	16,0	16,0	17,0	17,0
Persentase Ketersediaan SDM dan Kelembagaan yang Mapan	2,60	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
Nilai Tukar Petani Sub sektor Perkebunan	117,83	120,69	122,76	125,04	127,25	127,53	127,53

Sumber : data olahan dinas perkebunan Prov.jambi dan RPJMD 2021-2026.

Pengukuran masing-masing indikator tersebut, sebagai berikut ;

1. Nilai SAKIP OPD, berdasarkan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Formulasi Perhitungan :

Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD

2. Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan

Formulasi Perhitungan :

Produktivitas = Produksi tanaman perkebunan dibagi Luas tanam
Tanaman Menghasilkan (TM) dikali 1.000 Kg.

Produktivitas tahun (n) = Prod(n)

Rata-rata pertumbuhan produktivitas selama 5 tahun = r"(5)

Estimasi Angka Produktivitas tanaman perkebunan tahun (n+1) =
E'P(n+1)

E'P(n+1) = Prod(n) dikali Angka r"(5) dibagi 100 ditambah Prod(n).

Persentase peningkatan produktivitas perkebunan tahun (n) = %
^Prod(n)

% **^Prod(n)** = selisih Angka E'P (n+1) dengan Angka Prod (n) dibagi
Angka Prod (n) dikali 100.

3. Persentase Luas Areal Pengendalian OPT Perkebunan

Luas areal pengendalian OPT tahun (n) = La-OPT(n)

Rata-rata pertumbuhan Luas areal OPT selama 5 tahun = r"La-OPT(5)

Estimasi Luas areal pengendalian OPT tahun (n+1) = **E'La-OPT(n+1)**

E'La-OPT (n+1) = La-OPT(n) dikali Angka r"La-OPT(5) dibagi 100
ditambah La-OPT(n).

Persentase peningkatan Luas areal pengendalian OPT tahun (n) = %
^La-OPT(n)

% **^La-OPT(n)** = selisih Angka E'La-OPT (n+1) dengan Angka La-OPT (n)
dibagi Angka La-OPT (n) dikali 100.

Catatan : Angka Estimasi harus dipertimbangkan juga dengan kondisi
faktor X lainnya seperti (Kemampuan Keuangan daerah, dan
Usulan Kabupaten/Kota yang mengalami Gangguan OPT
Perkebunan).

4. Persentase peningkatan Sarana/prasarana pertanian/
perkebunan

Jumlah Sarana/prasarana tahun (n) = # SP(n)

Rata-rata pertumbuhan penyediaan SP selama 5 tahun = r"-SP(5)

Estimasi jumlah penyediaan SP tahun (n+1) = **E'#SP(n+1)**

E'#SP (n+1) = #SP(n) dikali Angka r"-SP(5) dibagi 100 ditambah #SP(n).

Persentase peningkatan Luas areal pengendalian OPT tahun (n) = %
^SP(n)

% **^SP(n)** = selisih Angka E'#SP (n+1) dengan Angka #SP (n) dibagi
Angka #SP(n) dikali 100.

Catatan : Angka Estimasi harus dipertimbangkan juga dengan kondisi faktor X lainnya seperti (Kemampuan Keuangan daerah, dan Usulan Kabupaten/Kota terhadap Sarana Prasarana pertanian).

5. Ketersediaan SDM dan Kelembagaan yang Mapan

Jumlah tenaga Penyuluhan dan Kelompok tani tahun (n) = # TPKt(n)

Rata-rata pertumbuhan penyediaan TPKt selama 5 tahun = $r''\text{-TPKt}(5)$

Estimasi jumlah penyediaan TPKt tahun (n+1) = **$E'\text{TPKt}(n+1)$**

$E'\text{TPKt}(n+1)$ = #TPKt(n) dikali Angka $r''\text{-TPKt}(5)$ dibagi 100 ditambah #TPKt(n).

Persentase peningkatan Luas areal pengendalian OPT tahun (n) = % **$^{\wedge}\text{TPKt}(n)$**

% **$^{\wedge}\text{TPKt}(n)$** = selisih Angka $E'\text{TPKt}(n+1)$ dengan Angka #TPKt (n) dibagi Angka #TPKt(n) dikali 100.

Catatan : Angka Estimasi harus dipertimbangkan juga dengan kondisi faktor X lainnya seperti (Kemampuan Keuangan daerah, dan Usulan Kabupaten/Kota terhadap Sarana Prasarana pertanian).

6. Nilai Tukar Petani subsektor Perkebunan (NTP- Subsektor Perkebunan)

Pendapatan kotor petani per tahun (n) = Rp-ptn/th(n).

Rp-ptn/th(n) = Jumlah produksi dikali harga jual. Atau

Rata-rata harga komoditi tanaman perkebunan tahun berkenaan dikali jumlah produksi dibagi 12 (dua belas) bulan.

Pendapatan bersih petani/th(n) = @Rp-ptn(n)

@Rp-ptn(n) = Rp-ptn/th(n) dikurang biaya (Produksi + OM)

NTP- Subsektor Perkebunan

Formulasi perhitungan : Data BPS

NTP-Subsektor perkebunan tahun (n) = NTP-pekebun(n)

Rata-rata pertumbuhan NTP-pekebun selama 5 tahun = $r''\text{-NTP-pekebun}(5)$

Estimasi Angka NTP-pekebun tahun (n+1) = **$E'\text{NTP-pekebun}(n+1)$** **$E'\text{NTP-pekebun}(n+1)$** = NTP-pekebun(n) dikali Angka $r''\text{-NTP-pekebun}(5)$ dibagi 100 ditambah Angka NTP-pekebun(n).

Persentase Angka NTP-pekebun tahun (n) = % **$^{\wedge}\text{NTP-pekebun}(n)$**

% **$^{\wedge}\text{NTP-pekebun}(n)$** = selisih Angka $E'\text{NTP-pekebun}(n+1)$ dengan Angka NTP-pekebun (n) dibagi Angka NTP-pekebun(n) dikali 100.

Catatan : Angka Estimasi NTP-perkebunan dipertimbangkan juga dengan kondisi faktor X lainnya seperti (Stabilitas harga produksi, harga kebutuhan pokok hidup petani/pekebun, dan kemampuan keuangan daerah untuk mensupport peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil perkebunan).

BAB VIII

PENUTUP

Pengembangan komoditas perkebunan di Provinsi Jambi belum optimal. Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, antara lain permasalahan dari aspek teknis berupa: (1) luas tanam dan luas panen tanaman perkebunan yang semakin menurun akibat bertambahnya tanaman tua dan rusak; (2) rendahnya produktivitas tanaman perkebunan; (3) kondisi sarana dan prasarana belum memadai; (4) penerapan teknologi perkebunan masih rendah; (5) Belum tertibnya permasalahan perizinan usaha perkebunan; (6) industri hilir perkebunan dan pemasarannya masih terbatas; dan (7) masih perlunya pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan keterampilan petani. Permasalahan lainnya juga ditemukan antara lain keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber permodalan dan kapasitas sumberdaya manusia petani yang masih rendah.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pembangunan perkebunan masih tetap penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1) potensi sumber daya yang besar dan beragam, 2) banyaknya penduduk yang bergantung pada sektor ini, 3) peluang pasar yang sangat terbuka, dan 4) berpotensi besar dalam memberikan kontribusi PDRB Provinsi Jambi.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan perencanaan pembangunan sub sektor perkebunan yang terarah, terpadu, dan bersinergi antar sub sektor/sektor terkait, dengan tetap mempedomani dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau prioritas program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa mendatang. Isu-isu dapat juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu mendatang. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 serta isu-isu bidang tanaman Perkebunan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk jangka waktu 2021-2026. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Perkebunan ini dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk tahun 2021 - 2026, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.